

**PRAKTIK POLITIK IDENTITAS PADA MASYARAKAT SIPIL DALAM
KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024**

**(Analisis Komparatif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan
Bumiayu)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

**UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

M. ISHLAHUL AZMAN

NIM: 1717304030

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIA'H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : M. Ishlahul Azman

NIM : 1717304030

Jenjang : S 1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PRAKTIK POLITIK IDENTITAS PADA MASAYARAKAT SIPIL DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024 (Analisis Komparatif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Maret 2024

Saya yang menyatakan



M. Ishlahul Azman

NIM. 1717304030

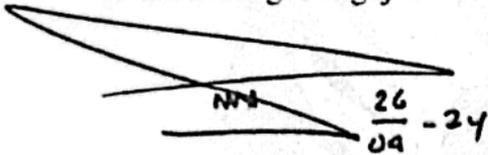
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Politik Identitas Pada Masyarakat Sipil Dalam Kontestasi Pemilihan Umum 2024
(Analisis Komparatif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu)**

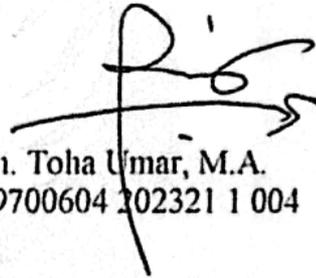
Yang disusun oleh M. Ishlahul Azman (NIM. 1717304030) Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



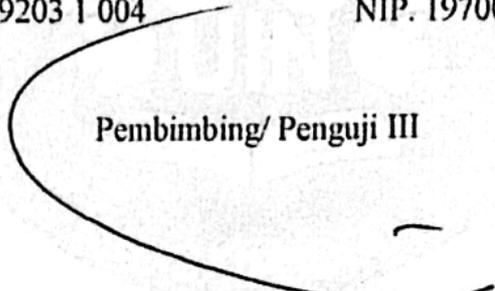
Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Moh. Toha Umar, M.A.
NIP. 19700604 202321 1 004

Pembimbing/ Penguji III



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 25 April 2024



Dekan, Fakultas Syari'ah

26 April 2024

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. M. Ishlahul Azman

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi ini maka saya sampaikan bahwa:

Nama : M. Ishlahul Azman

NIM : 1717304030

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah

Judul : **PRAKTIK POLITIK IDENTITAS PADA MASAYARAKAT SIPIL DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024 (Analisis Komparatif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). saya mengucapkan terimakasih. *Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, Maret 2024

Pembimbing

Lutqman Rico Khashogi, M.S.I
NIP. 198611042019031008

MOTTO

**“Kemajemukan Harus Dapat Diterima Tanpa Adanya Perbedaan
dan Yang Lebih Penting Dari Politik Adalah Kemanusiaan”**

KH. Abdurrahman Wahid



PERSEMBAHAN

Puji syukur Krhadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudaha dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini. Terimakasih kepada kedua orang tua saya sebagai cahaya yang tak pernah redup, senyum yang tak pernah sirna dan motivasi yang tak pernah berakhir.

Terimakasih kepada guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya khususnya Bapak Luqman Rico Khashogi, M.S.I. yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vocal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vocal panjang.

1. Vocal pendek

Vocal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	Dammah	U

2. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis

Fathah dan Ya	Ai	A dan I	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fathah dan Wawu	Au	A dan U	قول	<i>Qaul</i>

3. Vocal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah</i> + alif ditulis ā	Contoh تخارة ditulis <i>tijarah</i>
<i>Fathah</i> + ya" ditulis ā	Contoh على ditulis <i>'ala</i>
<i>Kasrah</i> + ya" mati ditulis ī	Contoh المشركين ditulis <i>al-musyrikina</i>
<i>Dammah</i> + wawu mati ditulis ū	Contoh يظهرها ditulis <i>yuzahiru</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>hikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis <i>ni' matullah</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap :

انّ حير	Ditulis <i>inahairon</i>
الذّين	Ditulis <i>al-ladzina</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti *Qomariyah*

الحجّام	Ditulis <i>al-hajjama</i>
القويّ	Ditulis <i>al-qawiyyu</i>

2. Bila diikuti *Syamsiyyah*

الرّحمن	Ditulis <i>ar-rahmani</i>
النّبّيّ	Ditulis <i>an-nabiyyu</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif.

Contoh:

أسكنو	Ditulis <i>'askinu</i>
أخرى	Ditulis <i>'ukhra</i>
أسلم	Ditulis <i>'aslama</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“PRAKTIK POLITIK IDENTITAS PADA MASAYARAKAT SIPIL DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024 (Analisis Komparatif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu)”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I, M.Hum.,M.pd Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Sekaligus sebagai dosen pembimbing yang dengan ikhlas telah membimbing, memberikan ilmu, dan meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan penelitian ini.

7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
8. Terkhusus kepada keluarga, Bapak Kamiluddin, Ibu Tabiah juga kakak dan adik penulis Mas Mahfud, Mba Zidti Imaroh dan Lulu Azkiah yang tidak ada hentinya mendoakan serta mensupport penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman penulis yakni Ulil, Tahmid, Hendi, Roger, Umam serta semua teman Perbandingan Madzhab angkatan 2017 yang selalu kebersamai penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Semoga kita semua sukses dijalan masing-masing.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 26 April 2024
Penulis



M. Ishlahul Azman
NIM. 1717304030

**PRAKTIK POLITIK IDENTITAS PADA MASYARAKAT SIPIL
DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024**

**(Analisis Komparatif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Kecamatan Bumiayu)**

ABSTRAK

M. Ishlahul Azman

NIM. 1717304030

Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini penulis analisis dalam pertanyaan seperti bagaimana praktik *Politik Identitas* pada masyarakat sipil dan bagaimana metode istinbath tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mengelola *Politik Identitas* di tengah masyarakat sipil Bumiayu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai apa persamaan dan perbedaan pandangan dan pola ijtihad tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menanggapi isu politik identitas yang terjadi di Bumiayu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Salah satunya dengan wawancara langsung di lokasi penelitian, yakni di kantor majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama dan kantor pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, artinya datanya tidak berupa angka tetapi kata-kata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok.

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas sebenarnya bukan hal yang baru sebab semua politik melibatkan unsur identitas. Secara sederhana, politik identitas dapat dipahami sebagai aktivitas politik yang berbasis identitas atau menggunakan identitas dalam memperjuangkan kepentingan dan kebaikan identitas melalui sarana politik dalam berbagai cara seperti Agama, Budaya, Ekonomi maupun Sosial. Adapun pandangan NU dan Muhammadiyah terkait hal tersebut bahwasanya praktik politik identitas itu tidak baik karena akan menimbulkan kegaduhan atau perpecahan sesama masyarakat khususnya di Bumiayu.

Kata kunci: *Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Politik Identitas*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PENGESAHAN.....	III
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	VII
KATA PENGANTAR.....	XI
ABSTRAK	XIII
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	16
C. Rumusan Masalah.....	18
D. Tujuan dan kegunaan	19
E. Kajian Pustaka	20
F. Sistematik Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK POLITIK IDENTITAS PADA MASYARAKAT SIPIL PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BUMIAYU	24
A. Teori Dasar Politik Identitas	24
B. Konsep Masyarakat Sipil	44
C. Pandangan Nahdalatul Ulama dan Muhammadiyah	48
BAB III METODE PENELITIAN	61

A. Jenis Penelitian.....	61
B. Sumber Data.....	61
C. Subjek dan objek penelitian	62
D. Metode Pengumpulan Data.....	63
E. Metode Analisis Data.....	65
BAB IV ANALISIS PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KECAMATAN BUMIAYU TERHADAP POLITIK IDENTITAS DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
.....	67
A. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Bumiayu Terhadap Praktek Politik Identitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum	67
B. Analisis pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu Terhadap Praktik Politik Identitas Bagi Masyarakat Sipil.....	73
C. Persamaan dan perbedaan pandangan NU dan Muhammadiyah Bumiayu terhadap politik identitas.....	81
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam 24 tahun terakhir, keadaan Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam hal politik. Setelah era reformasi 1998 berakhir, banyak orang merasakan keinginan baru untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kehidupan yang keras tidak lagi menakutkan masyarakat. Orang-orang sekarang terlibat dalam kehidupan negara dan nasional. Semakin banyak individu yang menyuarakan pendapat mereka. Munculnya banyak partai menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat semakin terserap. Akan tetapi, seiring berlalunya waktu, masih ada banyak masalah politik yang harus ditangani bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. tidak berjalan sesuai harapan.¹

Semua negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi harus menyelenggarakan pemilihan umum. Karena Pemilihan umum memungkinkan rakyat untuk memilih orang yang tepat untuk menjadi wakil mereka, dan mereka juga dapat menilai wakil yang mereka percaya selama periode sebelumnya. Melalui penilaian ini, mereka dapat menentukan apakah mereka masih akan mempercayai orang-orang yang mereka percayai atau akan menarik kembali kepercayaannya dan memberikannya kepada orang lain yang mereka anggap lebih sesuai. Pemilu harus dilakukan secara berkala karena membantu rakyat mengawasi wakil mereka. Ini adalah

¹ Prasetya Handaya Wicaksana, "Keterlibatan Kaum Awam Katolik Dalam Bidang Politik, (Studi Kasus di Desa Banjarsari Pada Tahun 2012-2013)", *Jurnal Politik*, Vol.03 No.2. 2014, hlm. 37.

kewajiban konstitusional untuk mengadakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.²

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang akan menjadi agenda politik untuk memberikan sebuah ruang partisipasi masyarakat sipil terhadap dalam suatu pemerintahan, akan tetapi pada realitasnya pemilu seringkali menjadi ruang perpecahan masyarakat karena fenomena politik identitas yang ditangani oleh partai politik dan substansi hukum pemilu yang dapat melahirkan politik identitas.³

Selama pemilu politisi sering mendekati ulama untuk mendapatkan dukungan mereka dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Partai-partai Islam dan nasionalis juga memperebutkan untuk dukungan ulama agar mendapatkan banyak suara.⁴ Karena ulama atau orang yang mempunyai banyak pengikut yang loyal juga ikut andil langsung dalam pemilu sejak Indonesia merdeka. Ulama adalah orang yang memahami agama Islam dan memiliki rasa takwa, tunduk, dan takut kepada Allah. Tidak mengherankan bahwa seorang ulama sangat dihormati oleh masyarakat karena posisi mereka yang unik dalam Islam. Seorang ulama dapat berfungsi sebagai penyiara agama, pemimpin rohani, pendidik, pembina dan penuntun umat, antara lain, dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam.⁵ Para ulama dalam kedudukannya sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat

² Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 7-10.

³ Electoral Governance, Tata kelola Pemilu Indonesia “Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas Dalam Pemilu” <https://journal.kpu.go.id>. diakses 5 Desember 2023. Jam 11:00.

⁴ A Bairahmat, “Elite Penentu Dalam Politik Lokal”, *Jurnal Jom Fisip*, Vol. IV, No. 2, 2017, hlm. 2.

⁵ Muhammad Dafan Inanda, “Pengaruh Ulama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan”, *Skripsi*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hlm. 22-26.

memiliki peran yang penting dan strategis. Mereka memperkokoh etika moral dan spiritual serta mencerahkan umat dengan ajaran nilai-nilai Islam begitu juga dalam dunia modern, peran fungsi dan tanggung jawab ulama tidak akan pernah tergantikan.⁶

Bahkan para ulama berusaha mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka untuk mengikuti apa yang mereka pilih. Mereka mengambil bagian dalam berbagai aktivitas di bidang keagamaan, seperti mengikuti pengajian secara teratur atau mengadakan pengajian khusus untuk alasan tertentu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana ulama terlibat dalam dunia politik.⁷ Clarke E Cochran mengatakan bahwa politik adalah arena yang didalamnya kepentingan-kepentingan individu seperti orang-orang yang dihormati seperti Ulama atau masuk dalam beberapa cara untuk ditangani melalui proses tertentu dan menjadi hasil kebijakan atau keluaran. Terutama bagi kaum realis yang sangat meyakini bahwa dalam arena politik para aktor saling mengejar kepentingannya masing-masing dan kepentingan yang paling inti dalam politik adalah kekuasaan.⁸

Politik juga didefinisikan berbeda-beda. Ada pakar yang mendefinisikan politik sebagai sebuah metode tertentu untuk menyelesaikan konflik. Politik sering kali juga diartikan sebagai proses untuk mengelola konflik. Sebagaimana dikatakan Andrew Heywood, politik sebagai proses

⁶ Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, "Peran Penting Ulama dalam Memperkokoh Moral dan Pemilu Jujur", <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id>. Diakses 5 Desember 2023. Jam 11:20.

⁷ Asep Jahidin, "Pertarungan Ulama di pilpres 2019", www.m.detik.com. diakses 6 Desember 2023.

⁸ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme dan Politik Identitas*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 152.

yang tujuan akhirnya adalah rekonsiliasi dan resolusi konflik.⁹ Seperti apa yang terjadi pada pilpres pada tahun 2019 di Indonesia antara Jokowi dan Prabowo yang akhirnya terjadi rekonsiliasi yang mengakibatkan meredanya permusuhan yang terjadi antar sesama masyarakat di Indonesia. Dapat diasumsikan bahwa perbedaan dan konflik sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh setiap orang, oleh sebab itu, jika terjadi perbedaan dan konflik dalam suatu masyarakat diperlakukan solusi dan rekonsiliasi.¹⁰ Seperti diketahui dalam setiap masyarakat modern (apalagi majemuk) terdapat berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan satu sama lain. Jika tidak dikelola dengan cepat pertentangan kepentingan itu dapat mengarah kepada konflik yang mengarah pada integritas dalam masyarakat itu sendiri. Yang berarti politik berperan sebagai sebuah metode untuk menyelesaikan konflik atau berfungsi sebagai proses untuk mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi disintegrasi.

Sedangkan di Indonesia mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 yang mana dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 sesuai pasal 7 ayat (1) UU no 12 tahun 2011. Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi atau dasar dari segala sumber hukum.¹¹ Di tingkat negara, proses pembuatan keputusan berkaitan dengan institusi-institusi politik, seperti partai-partai politik, kelompok-kelompok yang berkepentingan dan

⁹ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme dan Politik Identitas*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 153.

¹⁰ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme dan Politik Identitas...*, hlm. 153.

¹¹ Nafiatul Munawaroh, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia" <https://hukumonline.com>. diakses 14 April 2023.

lembaga-lembaga kenegaraan. Proses pengambilan keputusan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, tergantung pada sistem politiknya.¹²

Indonesia merupakan negara yang besar. Karena Indonesia di urutan ke 4 dengan populasi penduduk terbanyak. Indonesia juga mempunyai beragam bahasa, suku, ras ataupun agama. Karenanya Indonesia bisa dibilang dengan negara yang cukup diperbincangkan dalam dunia. Karena banyaknya keragaman. Banyaknya keragaman budaya di Indonesia tidak luput dari masuknya budaya luar baik sebelum Indonesia merdeka maupun setelah merdeka. Seperti contohnya budaya cina, arab, india dan eropa. Berakulturasi jadi budaya baru di Indonesia. Maka dari itu banyaknya identitas yang ada di Indonesia. Menurut Stella Ting Toomey identitas adalah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya etnis dan proses. Identitas berawal dari teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Henri Tajfel dan Jhon Turner pada tahun 1997. Teori tersebut awalnya dikembangkan untuk memahami dasar psikologis dari diskriminasi antar kelompok.

Identitas adalah istilah yang mengacu pada sifat unik seseorang atau anggota suatu kelompok atau kategori sosial tertentu. Identitas secara etimologis berasal dari kata Latin "idem", yang berarti sama. Oleh karena itu, identitas mengacu pada kesamaan atau kesamaan dengan orang lain dalam suatu area atau objek tertentu. Identitas memiliki dua makna: kesamaan dan perbedaan. Identitas dapat berarti sifat yang membedakan

¹² Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme dan Politik Identitas*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 153.

seseorang atau kelompok dari orang lain. Dengan demikian identitas memiliki dua makna. Yakni hubungan persamaan dan hubungan perbedaan. Hubungan persamaan dalam identitas terjadi ketika seseorang memiliki karakteristik yang membedakan mereka dari orang lain dalam kelompok tersebut. Hubungan perbedaan dalam identitas terjadi ketika seseorang memiliki karakteristik yang membedakan mereka dari orang lain dalam kelompok tersebut.¹³ Ada beberapa identitas yang dimaksud antara lain identitas agama, identitas budaya, identitas ekonomi, identitas generasi, identitas suku, dan identitas sosial. Dalam hal ini identitas tersebutlah yang mengakibatkan adanya polarisasi di dunia politik.

Secara umum masyarakat Indonesia sangat kental sekali dengan budaya kerjasama. Khususnya pada masyarakat Jawa lekat sekali dengan budaya gotong royong apabila ada saudara terkena musibah atau suatu masalah mereka akan membantunya begitupun dengan hal lainnya yang mana itu memperkuat suatu kelompok yang kokoh. Identitas tersebutlah merupakan salah satu identitas kelompok juga diartikan sebagai kelompok tersebut. Selain itu identitas melibatkan keadilan dan kelangsungan keberadaan. konsep yang paling diperdebatkan modernitas tidak hanya pada istilahnya sendiri tetapi melibatkan teori-teori tentang diri. dalam hal ini identitas dapat dipahami sebagai interpretasi diri terhadap dirinya sendiri. Secara umum dimaknai bahwa identitas seseorang adalah siapa orang

¹³ Budi Santoso, "Bahasa dan Identitas Budaya", *Jurnal Sabda*, Vol. 1, 2006, hlm. 44.

tersebut. Jika ia seorang muslim, islam adalah identitasnya, jika ia seorang Jawa ngapak, Jawa merupakan identitasnya dan seterusnya.¹⁴

Dengan demikian, politik identitas selalu terkait dengan kepentingan kelompok tertentu. Kelompok itu berbasis ras, etnis, agama, budaya, sosial, ekonomi, gender, daerah dan jenis pengelompokan apa pun. Mereka ini adalah satu manusia yang termarginalkan dalam sistem atau kelompok yang memiliki pengalaman ketidakadilan, penindasan, dominasi atau hegemoni dari kelompok yang lebih besar atau dominan. Sementara itu, kepentingan dari kelompok tersebut dalam menggunakan atau menonjolkan identitas dalam aktivitas politiknya adalah untuk mempromosikan gagasan dan pandangan dunianya yang berbeda serta menentang karakteristik yang dipaksakan oleh kelompok yang dominan. Oleh sebab itu, politik identitas sering kali dimaknai sebagai sesuatu yang negatif oleh banyak politisi dan masyarakat awam. Dalam perspektif negatif politik identitas dipandang sebagai politik yang menentang semua orang yang memiliki identitas yang berbeda.¹⁵

Dalam kontestasi politik pada tahun 2024 ini masyarakat khawatir adanya dinasti politik seperti pada zaman orde baru. Karena pada saat itu Indonesia dipimpin oleh presiden Soeharto selama kurang lebih 32 tahun. Ada beberapa masalah pada saat itu dinegara Indonesia. Anantara lain adanya diskriminasi terhadap salah satu etnis, adanya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengakibatkan krisis moneter sekitar tahun 1997-1998 ini

¹⁴ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme dan Politik Identitas*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 159.

¹⁵ Umar Suryadi, *Multikulturalisme dan Politik Identitas...*, hlm. 159.

merupakan masa kelam bagi rakyat Indonesia.¹⁶ Pada saat itu juga ada beberapa indikasi jatuhnya masa orde baru karena pada saat itu masyarakat Indonesia khususnya di luar pulau Jawa beranggapan bahwasanya pemerintah pada saat itu terlalu Jawa sentris. Karena fokus pembangunan pada saat itu hanya di pusat pemerintahan yang ada di pulau Jawa.

Ada beberapa Masyarakat beranggapan bahwa terjadinya dinasti politik dari kemunculan Gibran di Pilpres 2024 tidak lepas dari bantuan pamannya yang merupakan ketua MK dan ayahnya yang Presiden terkait masalah batasan umur cawapres yang tidak sesuai dengan peraturan KPU Nomor 1 tahun 2023 yang ketika itu belum di revisi, karena Gibran tidak memenuhi syarat karena belum berusia 40 tahun. Ia berumur 36 tahun. KPU berdalih putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres sudah cukup untuk dijadikan dasar memproses pencalonan mantan wali kota solo yang berusia 36 tahun itu. Walau demikian pada akhirnya KPU mengubah persyaratan capres-cawapres, dengan merevisi PKPU Nomor 19 tahun 2023. Akan tetapi revisi itu baru diteken pada 3 november. Yang mengakibatkan anggapan pada masyarakat terkait adanya unsur nepotisme yang melibatkan presiden dan keluarganya. Masyarakat menilai fenomena ini akan mengulang peristiwa beberapa tahun lalu yakni pada era orde baru. Adanya dinasti politik yang mengakibatkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.¹⁷ Hal inilah yang mengakibatkan adanya anggapan dari masyarakat, khususnya masyarakat sipil yang lebih dominan

¹⁶ Cnn Indonesia “Sejarah Singkat Orde Baru Latar Belakang dan Penyebab Jatuhnya”, <https://cnnindonesia.com>. diakses 15 Februari 2024.

¹⁷ Adi Wikanto, “Ada Pelanggaran Etika Saat Pendaftaran, Apakah Penetapan Cawapres Gibran Batal” www.kontan.co.id. Diakses 12 Februari 2024.

menyuarakannya terkait adanya kecurangan dalam pemilu tahun ini. Karena akan mengakibatkan banyak faktor seperti poling suara dan lain-lain.

Menurut Warsito dalam pemilu presiden-wakil presiden tahun 2024, faktor ideologi makin membingungkan karena terjadi irisan identitas antar pasangan capres-cawapres yang ada. Identitas nasionalis terdapat pada pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Adapun identitas religius, khususnya garis Nahdlatul Ulama, terjadi irisan antara pasangan nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor 3. Irisan identitas yang sama antarcapres-cawapres itu menimbulkan kebingungan bagi pemilih yang memiliki latar belakang identitas sama. Persoalan irisan identitas itu membuat ketokohan seseorang menjadi penentu pilihan masyarakat terhadap capres-cawapres mereka. Dukungan Presiden Joko Widodo terhadap capres-cawapres nomor 2 membuat pasangan ini mendapat limpahan suara dari pendukung Jokowi. Bagaimanapun, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi masih cukup tinggi.¹⁸

Adapun besarnya faktor-faktor nonrasional yang digunakan pemilu ini nyatanya dimanfaatkan pasangan capres-cawapres untuk meraup suara. Idealnya ketiga capres-cawapres memang mengemukakan gagasan terbaik dalam membangun negara ke depan, hal-hal yang akan mereka lakukan dan dihindari saat menjabat. Seperti contohnya banyak anak muda yang memilih pemimpin berdasarkan bentuk fisik contohnya istilah gemoy yang

¹⁸ Muchamad Zaid Wahyudi, “ Karakter Pemilih Pemilu 2024”, <https://www.kompas.id>. diakses 2 Maret 2024.

digunakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 menjadi cara jitu menarik pemilih secara emosional, khususnya anak muda dan gen Z yang menganggap istilah karena viral dan hal itu lucu. Nyatanya, gagasan yang baik saja tidak cukup. Sebagian pemilih sulit mencerna gagasan besar yang disampaikan, apalagi jika gagasan itu disampaikan dengan bahasa "langit" yang rumit. Belum lagi, mayoritas pemilih Indonesia memiliki tingkat pendidikan SMP ke bawah. Karena banyak faktor yang mungkin tidak bisa dipahami oleh beberapa kalangan.¹⁹

Pendekatan inilah yang dikritisi oleh masyarakat sipil karena banyaknya masyarakat yang awam khususnya para orangtua dan gen Z yang dibodohi oleh sosial media yang mana ada berisi hoax. Karenanya masyarakat sipil memiliki pandangan yang berbeda atau masyarakat lainnya. Masyarakat sipil terdiri dari berbagai bentuk organisasi voluntir dan merupakan dunia politik utama dimana semuanya itu berada dalam aktivitas ideologis dan intelektual yang dinamis maupun konstruksi hegemoni.²⁰

Menurut Gramsci "semua orang adalah intelektual" dan "tidak semua orang punya fungsi intelektual dalam masyarakat" maka setiap masyarakat memiliki individu yang berperan menyuarakan dan menyebarkan ideologi dominan dan membenarkan struktur sosial, ekonomi dan politik masyarakat tersebut. Dengan kata lain, senantiasa ada intelektual

¹⁹ Muchamad Zaid Wahyudi, " Karakter Pemilih Pemilu 2024", <https://www.kompas.id>. diakses 2 Maret 2024.

²⁰ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sipil Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). hlm. 59-60.

ini terutama dibentuk melalui informasi dan lembaga formal. Menurutnya sekolahlah adalah aparat formal bagi penyebaran ideologi.²¹

Sebenarnya dalam pemilu tahun 2024 ini juga ada terjadinya politik identitas namun lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Namun Ada beberapa contoh terkait politik identitas seperti, baliho yang mengatasnamakan salah satu agama tertentu bertujuan agar mendapatkan dukungan dari sesama agamanya. Namun di setiap pemilu di Indonesia masih adanya *money politic* atau politik uang yang mana para masyarakat dibayar agar memilih politisi yang mengasih uang agar mendapatkan suara banyak dan memenangkannya. Begitu pula dengan janjinya yang ada di baliho yang mengatasnamakan salah satu agama tertentu.

Namun, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah menolak politik identitas menjelang Pemilu 2024. PBNU dan PP Muhammadiyah mendukung perlombaan yang mengutamakan politik logis dan jujur. Itu disampaikan setelah pertemuan yang diadakan di gedung PBNU. Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf berharap visi tentang agenda nasional dan komitmen untuk menjalankan kompetisi dilakukan dengan cara yang lebih etika. Dia berpendapat bahwa polarisasi dalam persaingan politik yang mengarah pada politik identitas dapat merugikan kepentingan umum. Selain itu, Haedar Nashir ketua umum PP Muhammadiyah memberikan informasi yang sama. Haedar menegaskan bahwa visi kebangsaan yang telah ditetapkan oleh para pendiri negara harus didiskusikan dan diimplementasikan. Menurutnya, ruang publik harus

²¹ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sipil Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). hlm. 64.

dibuka untuk diskusi antar kontestan dan calon kontestan. Agar mengetahui gagasan para calon yang akan mengikuti kontestasi ini dan tidak menimbulkan kecurangan terhadap kontestasi pemilu tahun 2024 ini.²²

Sebelumnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada tahun 1945 mendirikan partai Masyumi. Partai ini berideologi islam Masyumi merupakan partai yang anggotanya heterogen maka dari itu banyaknya perbedaan kepentingan politik. NU keluar dari tahun 1952 karena adanya perbedaan pendapat dan NU mendirikan partai dengan nama yang sama yakni partai Nahdlatul Ulama dan pada pemilu pertama NU ikut pada tahun 1955 dan mendapatkan 45 kursi. Sedangkan Muhammadiyah masih terkait dengan Masyumi pada saat itu masyumi mendapatkan 57 kursi. Sampai pada saat 1960 pemerintah pada saat itu melarang partai masyumi. Akhirnya Muhammadiyah keluar dan bergabung dalam sekertaria bersama Golongan Karya atau GOLKAR.²³ Ada sebagian yang keluar dari golkar dan beberapa tokoh-tokoh Muhamadiyah mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada tahun 1968. Namun dari hasil muktamar Muhammadiyah ke 38 di Ujung Padang memutuskan untuk organisasi ini berfokus pada gerakan dakwah Islam. Begitu pula dengan NU saat diselenggarakannya munas NU tahun 1983 di Situbondo yang berisi NU kembali ke *khittah*. Yang artinya fokus NU sebagai organisasi masyarakat membantu dalam hal apapun yang ada dalam aspek kehidupan masyarakat. Mengikuti faham *ahlusunnah waljama'ah* sebagai pedoman bagi warga NU. Nahdlatul Ulama

²² Fathia Nabila Qonita, "PBNU dan Muhammadiyah Tolak Politik Identitas, Dorong Politik Rasional". *News.detik.com*, diakses 9 Desember 2023.

²³ Rina Widiastuti. "Kiprah Muhammadiyah di Kancah Politik dari Masa ke Masa", *www.tempo.com*. Diakses 15 Februari.

dan Muhammadiyah adalah organisasi Masyarakat agama Islam di Indonesia. Dengan melihat rekam jejak dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang bertanggung jawab atas jutaan orang Islam di Indonesia, ada masalah perbedaan perspektif.²⁴

Selain itu, di Kecamatan Bumiayu memiliki sekitar 112680 penduduk, menurut sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2022 kemarin yang dibagi menjadi 15 kelurahan atau desa. Mayoritas orang di Kecamatan Bumiayu menganut agama Islam dan mereka tergabung dalam berbagai organisasi atau aliran Islam termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut adalah organisasi lama di antara ormas dan kelompok Islam lainnya di Bumiayu. Tidak diragukan lagi, kedua ormas tersebut memiliki perspektif yang berbeda tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik. Misalnya kedua ormas tersebut menyatakan bahwa mereka bersikap netral tidak memihak siapapun dalam pilihan umum. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) menyatakan bahwa Muhammadiyah di Bumiayu akan tetap berada di pihak netral seperti pada pemilihan umum sebelumnya, seperti yang dilaporkan satelitpost. Meskipun Muhammadiyah memiliki hubungan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) secara kultural begitu pula dengan NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di beberapa tempat Majelis Wakil Cabang (MWC) menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan dan tidak terlibat dalam politik praktis meskipun kadernya terlibat dalam politik.

²⁴ Anonim, "NU dan Muhammadiyah Berbeda dalam Satu", *www.pinterpolitik.com*, diakses 5 Desember 2023.

Karena Keterlibatan suatu tokoh agama dalam dunia politik sebenarnya mempunyai efek yang positif salah satunya adalah bisa mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memperingatkan agar pemilu berjalan dengan damai. Adapun masyarakat sipil yang mana merupakan masyarakat yang modern dan kritis.²⁵ Mengingat kehidupan modern yang sudah menyatu dengan dunia internet hampir semua lapisan usia dan kalangan masyarakat Indonesia rentan menjadi korban provokasi hoaks melalui media sosial. Data menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Per Januari 2022, jumlah pengguna internet di tanah air mencapai 204,7 juta, menurut kata data media network dari laporan *We Are Social*. Jumlah tersebut meningkat tipis 1,03% dari tahun sebelumnya.²⁶

Mengingat pada 22 Mei 2019, saat terjadi demonstrasi massa di depan kantor bawaslu, pemerintah bahkan sempat membatasi penggunaan media sosial untuk mengurangi penyebaran hoaks. Sebagaimana diketahui peristiwa tersebut berubah menjadi kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan di berbagai lokasi. Karena efek negatif hoaks penanganan hoaks dianggap penting terutama menjelang tahun pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini masih adanya masyarakat yang tidak bisa membedakan berita yang real maupun hoax. Untuk mengantisipasi terjadinya berita hoax, pemerintah menyarankan agar

²⁵ Umam, "Pengertian Masyarakat Madani, Ciri-ciri, Karakteristik dan Sejarahnya", *www.gramedia.com*. Diakses 15 Februari.

²⁶ Suliansyah, "Menepis Hoax di Media Sosial ditahun Politik: Pendekatan Systematic Literature Review", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol.6 No.1, 2023, hlm: 324.

masyarakat lebih bijak dan teliti terhadap menggunakan sosial media. Replikasi ini dilakukan dengan tujuan mendorong semua pihak untuk berpartisipasi dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dengan dilandasi toleransi, moderasi dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Selain itu, penelitian ini dianggap penting karena hoaks telah terjadi di Indonesia pada dua kali pemilihan presiden dan wakil presiden, dan metode ini diprediksi akan digunakan lagi di masa depan.²⁷

Sangat penting untuk menggabungkan teori dari banyak pakar untuk memperjelas batasan kajian politik identitas. Karena politik identitas baru-baru ini menjadi fokus perhatian dalam perkembangan politik Indonesia, terutama terkait dengan penggunaan simbol tertentu dalam pemilu dan pilkada. Marak terjadi upaya para elit politik untuk menggunakan identitas etnik dan agama sebagai alat untuk mendapatkan dukungan politik. Politik identitas digunakan oleh elite politik untuk memenangkan kontestasi politik dan sering menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Politik identitas terus dibuat di ruang publik oleh kalangan elit untuk mendapatkan dukungan elektoral.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan Politik Identitas dan menjelaskan dampak positif maupun negatifnya bagi masyarakat. Lalu mendeskripsikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PRAKTIK POLITIK IDENTITAS PADA MASYARAKAT**

²⁷ Suliansyah, “Menepis Hoax di Media Sosial ditahun Politik: Pendekatan Systematic Literature Review”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol.6 No.1, 2023, hlm. 324.

SISPIL DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024 (Analisis Komparatif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu)”

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas perlu disertakan penjelasan tentang beberapa kata kunci, juga dikenal sebagai "*keyword*". Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk memberi pembaca dasar untuk memahami lebih lanjut tentang topik dan untuk menghindari kesalahpahaman tentang arah kajian ini.

1. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Nahdlatul Ulama didirikan sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah (organisasi keagamaan masyarakat) untuk membantu para ulama dan pengikutnya. Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ary mendirikan Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tanggal 16 rajab 1344 atau 31 Januari 1926.²⁸ Nahdlatul Ulama didirikan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam *Ahlu al-Sunnah Wal Jama'ah*, yang menganut salah satu dari empat madzhab dan menyatukan langkah para ulama dan pengikutnya dan melakukan tindakan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.²⁹ Sedangkan Muhammadiyah adalah kelompok Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 *dzulhijjah* tahun 1330 H, bertepatan

²⁸ Soeleiman Fadeli, *Analogi NU (Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah)*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 6.

²⁹ Soeleiman Fadeli, *Analogi NU (Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah)*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 6.

dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang berbasis pada al-quran dan as-sunnah. Harapannya dengan memberi nama Muhammadiyah adalah agar anggota Muhammadiyah dapat mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. dalam kehidupan mereka. Di sisi lain, berfungsi sebagai wadah atau alat yang digunakan untuk memulai kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.³⁰

2. Politik Identitas

Istilah politik identitas dalam pemakaiannya secara umum mengacu pada kecenderungan orang yang berbagi agama, ras, etnis, sosial dan budaya tertentu untuk membuat suatu aliansi politik yang eksklusif, sebagaimana yang dikemukakan Joseph Klein, politik yang cenderung untuk memperkokoh sekelompok tertentu tanpa melihat kelompok yang lain atau tanpa memerdulikan kelompok yang lebih besar.³¹

Kelompok tertentu yang telah merasakan pengalaman yang tidak adil oleh suatu kelompok lain, maka dari itu mereka bersama memperjuangkan yang mereka tidak dapatkan pada waktu itu dan menentang dominasi dari kelompok yang lebih besar. Oleh sebab itu politik identitas sering mengacu pada ketegangan dan pergulatan tentang hak untuk memetakan dan mendefinisikan idealnya mereka hidup. Serta memperbaiki esensi dari kelompok tertentu.

³⁰ Nurhayati, dkk, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*, (Yogyakarta: Trust Media, 2018), hlm. 2.

³¹ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme dan Politik Identitas*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 161.

3. Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil adalah masyarakat yang tidak terkait dengan pemerintah atau non pemerintahan, yang mana mempunyai kepentingan dan kemauan warga negara atau individu dan kelompok tertentu dalam masyarakat yang independen terhadap Pemerintah. Terkadang masyarakat sipil bisa diartikan juga dengan elmen-elemen seperti kebebasan berpendapat dan kesejahteraan Umum. Secara konsep masyarakat sipil membekali warga dengan pengetahuan yang penting bagi partisipasi politik, seperti kewajiban dan hak warga negara terkait dengan proses pemerintahan.³² Dalam hal ini berbeda dengan masyarakat awam yang mana tidak begitu paham tentang pengetahuan dan keahlian yang spesifik dari subjek tertentu. arena banyaknya masyarakat awam yang tidak mengetahui atau kurang mengenal tentang dunia politik. Hal ini banyak yang di manfaatkan oleh beberapa oknum yang memiliki kekuatan atau nama dan di gunakan untuk kepentingan individu atau kelompok yang eksklusif seperti dengan cara mempolitisasi hal-hal yang sedang viral dan dijadikan bahan kampanye atau menarik suara.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik *Politik Identitas* pada Masyarakat Sipil menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Bumiayu?

³² Otho H Hadi, "Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokrasi", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 14. No 2. hlm. 118.

2. Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Istinbath Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menanggapi Praktik *Politik Identitas* di tengah Masyarakat sipil?

D. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

- a. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai Praktik Politik Identitas dan dampaknya di Bumiayu.
- b. Mengetahui pola ijtihad tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Bumiayu dalam berpolitik.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pandangan dari dua Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait Politik identitas.
- b. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap Mahasiswa. Khususnya Mahasiswa Prodi Perbandingan Madhazab yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu terkait Praktik Politik Identitas dengan analisis komparatif pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang mereka miliki tentang hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada.³³ Kajian pustaka adalah proses yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang mereka miliki tentang hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada. Penulis berusaha melakukan penelusuran dan analisis temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis dalam penelitian ini. Di antara literatur yang akan dibahas oleh penulis adalah:

Pertama penelitian ini yang berjudul "*Politik Identitas Di Kota Mataram (Studi Pemenangan Pasangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015)*" karya Silmi Susanti Universitas Muhammadiyah Mataram. Studi ini bertujuan untuk mengetahui politik identitas kota Mataram setelah kemenangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana pada pilkada kota Mataram 2015. Studi ini didasarkan pada keanekaragaman etnis dan agama masyarakat Mataram, yang menghasilkan berbagai pandangan politik tentang identitas yang berbeda, yang sering digunakan sebagai alat politik. Ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di Bumiayu dan mungkin bisa terjadi karena beberapa faktor yang tidak konsisten di kalangan masyarakat. Kaitannya dengan apa

³³ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

yang terjadi di Bumiayu sangat mirip dan mungkin bisa terjadi karena beberapa faktor yang tidak relvan di kalangan masyarakat.³⁴

Kedua penelitian ini yang berjudul *Peran Politik Identitas Etnis (studi kasus Pilkades Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat)* karya Lukman Yunus Universitas Muhammadiyah Makassar menjelaskan tentang masalah utama dalam penelitian ini berfokus pada tahun politik terutama pada masyarakat multi etnis di mana identitas politik sering mewarnai perpolitikan. Di Siru, ada empat etnis: Ndahe, Tere, Jombok, dan Pa'ang. Setiap etnis memiliki perwakilan yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dalam pilkades, menunjukkan bahwa salah satu etnis, yaitu Ndahe, memiliki mayoritas penduduk yang lebih besar dan selama pilkades perwakilan dari keempat etnis ini lebih banyak menempati jabatan kepala desa. Kaitannya dengan apa yang ada di Bumiayu sering terjadi seperti apa yang di jelaskan di skripsi tersebut. Kemudian ada asumsi bahwa identitas etnis mungkin memainkan peran dalam strategi kemenangan calon kepala desa. Namun, jika melihat gejala politik etnik di beberapa daerah konflik kepentingan karena etnosentrisme masing-masing etnis baik dari segi agama maupun bahasa.³⁵

Ketiga jurnal tentang *Politik Identitas dan Reresentetasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2018-2022)* karya Juhana Nasrudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

³⁴ Silmi Susanti, "Politik Identitas Di Kota Mataram (Studi Pemenangan Pasangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram. 2015.

³⁵ Lukman Yunus, "Peran Politik Identitas Etnis (studi kasus Pilkades Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar 2014.

Menjelaskan pelaksanaan pilkada DKI 2017 yang sudah berlalu merupakan potret yang menunjukkan dimana politik identitas yang cenderung mengarah ke isu suku, agama dan ras. Karena peranan suku, ras dan agama berperan sangat kuat bahkan sudah menjadi suatu hal yang umum sehingga memberikan tekanan psikologis kepada masyarakat untuk memilih siapa yang menurutnya baik terhadap apa yang masyarakat lakukan baik dari segi bisnis atau usaha yang baik maupun yang buruk sama halnya di Bumiayu terjadinya faktor tersebut karena faktor yang sudah terjadi sebelumnya maupun yang akan datang.³⁶

F. Sistematik Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi substansi dasar atau pemikiran awal dan pendahuluan untuk memberikan gambaran awal penelitian penulis hingga mendapatkan substansi yang lengkap. Latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, dan kajian pustaka adalah beberapa contohnya.

Bab kedua, kajian teori yang menjelaskan terkait prespektif Tokoh NU dan Muhammadiyah: pengertian politik identitas, macam-macam politik berdasarkan identitas yang terjadi pada masyarakat serta membahas tentang sejarah politik NU dan Muhammadiyah.

³⁶ Juhana Nasirudin “Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2018-2022)”, *Jurnal*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2022.

Bab ketiga, menjelaskan terkait metode penelitian antara lain jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang di jelaskan oleh penulis sebagai pembahasan dalam skripsi ini.

Bab keempat, pembahasan terkait tentang analisis perbandingan penetapan antara pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait praktik politik identitas dan dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mengembangkan sudut pandang mereka terkaithukumnya berpolitik dan membahas tentang pola ijtihad NU dan Muhammadiyah mengenai praktik politik identitas serta menjelaskan dampak positif dan negatifnya pada kehidupan masyarakat di Bumiayu.

Bab kelima, bagian akhir dan skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada serta berisi saran - saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PRAKTIK POLITIK IDENTITAS PADA MASYARAKAT SIPIL PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH BUMIAYU

A. Teori Dasar Politik Identitas

Identitas bersal dari kata “*idem*” dalam Bahasa latin yang berarti sama. Identitas Mengacu pada karakter khusus individu atau anggota suatu kelompok atau kategori social tertentu.³⁷ Dalam ruang lingkup gerakan politik yang dapat digambarkan sebagai politik identitas sangat luas dan bervariasi dari satu negara ke negara lain perbedaan definisi tentang politik identitas akan membedakan cakupan dari politik identitas itu sendiri, karena identitas itu banyak seperti identitas agama, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya.³⁸ Dalam hal ini penulis akan menjabarkan terkait faktor-faktor terjadinya politik identitas anantara lain:

1. Identitas Agama

Agama adalah salah satu moral paling penting di Indonesia, karena ia memiliki kemampuan untuk mengatur baik buruknya tingkah laku secara psikologis. Agama tidak hanya diajarkan sebagai landasan filosofis kenegaraan, tetapi juga diajarkan melalui keluarga dan lembaga keagamaan lainnya. Dengan demikian, kepercayaan agama seorang anak yang tumbuh dewasa juga diperoleh dari orang tuanya. *Emerging adult*,

³⁷ Budi Santoso, “Bahasa dan Identitas Budaya”, *Jurnal Sabda*, Vol. 1, No.1 2006, hlm. 44-45.

³⁸ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme dan Politik Identitas*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 164.

terutama mereka yang memasuki perguruan tinggi, mungkin masih mempertanyakan pandangan dan kepercayaan yang telah dibawanya sejak lahir. *Emerging adult* yang memasuki perguruan tinggi mendapatkan banyak alternatif pandangan dan memberi arahan untuk menguji pandangan dan kepercayaan mereka sendiri, yang menyebabkan agama yang didapatkan dan dipertanyakan kembali. Selanjutnya, proses ini mengambil peran pada perspektif yang telah dibangun sejak kecil, yang digunakan untuk membangun kemampuan penalaran abstrak. Kemampuan ini digunakan dalam pertanyaan tentang konsep seperti baik-benar, kematian, dan tuhan. Keraguan pada agama meningkat seiring bertambahnya usia, bersama dengan penurunan kepercayaan, dan peningkatan kecenderungan untuk mempertanyakan agama, kepercayaan dan keyakinan.³⁹

Pembentukan identitas agama: agama dapat membantu memperkuat identitas seseorang dengan membantu mereka menggunakan kemampuan berpikir kritis mereka untuk mempertimbangkan dan mempertanyakan keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut. Sangkutannya dengan politik, agama juga bisa digunakan dalam memilih calon pemimpin dalam hal ini agama, sebagai konteks spiritual, membantu individu mengeksplorasi masalah yang terjadi selama perkembangan identitas yang terjadi di Indonesia. Berbeda dengan orientasi religiusitas ekstrinsik, orientasi religiusitas intrinsik

³⁹ Rizkita Imanina dan M. Akhyar “ Gambaran Pembentukan Agama Pada *Religious Disbeliever* Usia *emerging Adult*”, *Jurnal Mindset*, Vol. IX. No.1. 2018. hlm.19.

berfokus pada keinginan seseorang untuk mengikuti agama mereka. penelitian Allport tentang agama menekankan pada individu dan aspek religiusitas intrinsik.⁴⁰

Untuk memilih calon pemimpin dengan menginternalisasi prinsip-prinsip agamanya. Menurut Barron, orang mengembangkan kepercayaan dan prinsip secara bertahap. Sementara orientasi religiusitas ekstrinsik mendorong orang untuk memanfaatkan agamanya secara instrumental, orientasi intrinsik ini menyebabkan rasa bersalah dan penerimaan konsep tentang dosa dan pahala.

Sehingga pembentukan identitas agama ini melibatkan tahapan psikososial yang merupakan perpaduan dari pengalaman masa kecil seseorang hingga mereka membentuk identitas agamanya. Dalam penelitian ini pembentukan identitas agama juga terintegrasi dengan orientasi religiusitas intrinsik dan ekstrinsik terlepas dari status identitas yang dimiliki seseorang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gambaran pembentukan identitas digambarkan sebagai proses eksplorasi identitas agama untuk mencapai komitmen menjadi religious disbeliever pada usia emerging adult. Pembentukan identitas juga dilihat dari penyelesaian konflik yang terjadi pada tahapan psikososial individu. Pada tahapan psikososial, peran orang tua dan lingkungan sosial juga memainkan peran dalam membantu individu menyelesaikan konflik pada setiap tahapan.

⁴⁰ Rizkita Imanina dan M. Akhyar “ Gambaran Pembentukan Identitas Agama Pada *Religious Disbeliever* Usia *emerging Adult* ”, *Jurnal Mindset*, Vol. 9. No.1, 2018, hlm. 22

Setiap tahapan yang diselesaikan ini saling berkaitan dan menghasilkan identitas individu yang akan ditampilkan di lingkungan sosialnya.⁴¹

2. Identitas Budaya

Budaya sebenarnya berasal dari sanksekerta budhayah, bentuk jamak dari kata buddhi, yang berarti budi atau akal, dan bentuk jamak dari kata budi dan daya, yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Bahasa Inggris "budaya" berasal dari kata "culture" dalam bahasa Belanda, dan "colera" dalam bahasa Latin. Colera berarti mengolah, mengerjakan, dan menyuburkan tanah. Pengertian ini kemudian berkembang menjadi culture, yang berarti semua upaya manusia untuk mengolah dan mengubah alam.⁴² Kebudayaan juga disebut sebagai budaya, mencakup semua aspek kehidupan manusia baik materi maupun nonmateri. Teori evolusionisme yang menyatakan bahwa kebudayaan akan berkembang dari tahapan yang lebih sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks mungkin sangat memengaruhi sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan.

Identitas budaya suatu masyarakat tumbuh melalui proses. Namun sebelum masuk ke tahap pembentukan identitas budaya ini, penting untuk memahami identitas budaya terkait. Hal ini disebabkan fakta bahwa pemahaman tentang identitas budaya sering disalahartikan oleh pengertian identitas sosial. Identitas jelas terkait dengan peran.⁴³

Identitas budaya kita menurut Alo Liliweri berkembang melalui berbagai fase seperti:

⁴¹ Rizkita Imanina dan M. Akhyar “ Gambaran Pembentukan Identitas Agama Pada *Religious Disbeliver* Usia *emerging Adult* ”, *Jurnal Mindset*, Vol. 9 No.1, 2018, hlm. 34-35

⁴² Elly M Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.

⁴³ Rini Damarastuti, “*Mindfulness dalam Komunikasi Antarbudaya Pada Kehidupan Masyarakat Samin dan Masyarakat Rote Ndao NTT*”, (Yogyakarta: Buku Litera, 2013), hlm. 97.

a. Identitas budaya yang tidak disengaja.

Pada titik ini identitas budaya mungkin terbentuk secara tidak sengaja atau tanpa disadari. Identitas budaya yang tidak disadari muncul melalui tindakan dan interaksi sehari-hari. Banyak dari identitas budaya yang dimiliki oleh suatu suku bangsa diperoleh secara tidak teruji, tidak sengaja atau tidak disadari.

b. Pencarian identitas budaya

Pada tahap kedua identitas budaya dicari secara sengaja. Penajakan, pertanyaan, dan uji coba identitas budaya adalah bagian dari pencarian identitas budaya ini. Masyarakat yang memiliki identitas budaya tersebut atau orang lain dapat melakukan proses ini. Ketika kita ingin mencari identitas dari budaya lain, kita sering melakukan proses ini juga.⁴⁴

c. Identitas budaya yang diperoleh

Setelah internalisasi kebudayaan seseorang, tahap ketiga adalah memperoleh identitas budaya. Tahap ini dikenal sebagai penerimaan identitas budaya dan dicirikan oleh kejelasan dan keyakinan tentang bagaimana anda menerima diri sendiri.

d. Konformitas Internalisasi

Internalisasi yang menghasilkan konformitas adalah cara untuk mencapai pembentukan identitas. Hal ini dapat dilakukan

⁴⁴ Rini Damarastuti, “*Mindfulness dalam Komunikasi Antarbudaya Pada Kehidupan Masyarakat Samin dan Masyarakat Rote Ndao NTT*”, (Yogyakarta: Buku Litera, 2013), hlm. 97-98.

dengan cara membuat kebiasaan kita menjadi sama dengan kebiasaan dominan atau mungkin membuat kebiasaan kita masuk ke dalam kultur dominan. Pada tahap ini, orang sering melihat diri mereka melalui lensa budaya dominan daripada budaya asal mereka.⁴⁵

e. Resistensi dan Separatisme

Identitas budaya seperti resistensi dan separatisme dibentuk oleh komunitas minoritas dari suku bangsa, etnik, atau agama tertentu. Komunitas ini bertindak secara eksklusif untuk menentang standar budaya yang berlaku.

f. Integrasi

Pembentukan identitas budaya juga dapat dilakukan melalui proses integrasi budaya. Proses integrasi budaya merupakan proses dimana seorang atau sekelompok orang mengembangkan identitas baru yang merupakan hasil dari integrasi pelbagai budaya dari komunitas atau masyarakat asal.⁴⁶

Orang-orang yang pindah dari satu tempat ke tempat lain seringkali menentukan identitas budaya. Ada kemungkinan bahwa terpaan informasi yang kuat dari media massa juga berkontribusi dan memengaruhi pembentukan identitas budaya karena kemajuan teknologi yang pesat. Proses pembentukan dan perkembangan peradaban manusia

⁴⁵ Rini Damarastuti, *“Mindfulness dalam Komunikasi Antarbudaya Pada Kehidupan Masyarakat Samin dan Masyarakat Rote Ndao NTT*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2013), hlm. 98.

⁴⁶ Rini Damarastuti, *“Mindfulness dalam Komunikasi Antarbudaya Pada Kehidupan Masyarakat Samin dan Masyarakat Rote Ndao NTT”*..., hlm. 98.

sangat dipengaruhi oleh mobilitas. Karena itu, perbedaan tempat dalam kehidupan manusia telah menghasilkan definisi baru tentang diri sendiri dan lingkungan kebudayaan mereka begitu pula dalam hal politik.⁴⁷

3. Identitas Ekonomi

Ada tiga tahapan analisis identitas dalam ekonomi. *Pertama*, *mnenentukan* kategori sosial atau identitas seseorang dalam konteks sosial tertentu. *Kedua*, melihat dari norma yang dianut oleh masing-masing identitas sosial yang ada. *Ketiga*, melihat dari segi keuntungan dan kerugian yang akan terjadi ketika seseorang mengidentifikasi dirinya dengan identitas sosial tertentu.⁴⁸ Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan kemajuan ekonomi menimbulkan dinamika yang sangat kompleks. Seringkali logika ekonomi semata tidak cukup untuk memahami atau menganalisis peristiwa, fenomena atau perkembangan ekonomi. Selain itu, para analisis dan ekonom tidak dapat meramalkan krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Namun dengan menggunakan teori ekonomi dan alat analisis yang canggih. Tidak mudah untuk menjelaskan fenomena yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang mempengaruhi peristiwa ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun berbagai faktor memengaruhi namun dipengaruhi oleh faktor sosial politik sangat berdampak.⁴⁹

⁴⁷ Rini Damarastuti, “*Mindfulness dalam Komunikasi Antarbudaya Pada Kehidupan Masyarakat Samin dan Masyarakat Rote Ndao NTT*”, hlm. 99.

⁴⁸ Eko Widodo”Pentingnya Identitas dalam Ekonomi”, <https://swa.co.id>. Diakses 20 Maret 2024.

⁴⁹ Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.

Di Indonesia kebutuhan pokok utama adalah makanan, dengan kebutuhan utamanya adalah beras. Akibatnya kebijakan pangan sering identik dengan kebijakan perberasan. Singkatnya, beras harus selalu tersedia, tetapi harganya harus dikontrol. Pemerintah selalu meminta petani menanam padi dengan harga yang terjangkau bagi rakyat, tetapi pemerintah menetapkan harga dasar beras untuk mencegah petani menanam komoditas lain. Akibatnya kebijakan ini menjadikan beras sebagai komoditas politik.⁵⁰

Adapun pemerataan harga pangan yang ada di Indonesia tersebut memiliki perbedaan yang cukup tinggi. Misalnya di daerah luar pulau Jawa seperti di Papua harga beras berbeda dengan harga yang ada di pulau Jawa karena faktor tingginya biaya logistik. Ini menandakan masih adanya kesenjangan ekonomi di masyarakat Indonesia. Adanya perbedaan status sosial juga mempengaruhi ekonomi yang ada di Indonesia. Masih adanya diskriminasi antara kelas menengah kebawah dan kalangan atas. Dalam kontestasi politik tahun 2024 ini ada beberapa perbedaan pilihan antara golongan Masyarakat baik dikelas atas, menengah maupun kebawah. Di Bumiayu sendiri menurut hasil survei banyaknya masyarakat menengah kebawah memilih partai PDI adapun beberapa memilih Gerindra dan yang lainnya. Karena kita tahu PDI adalah partai yang sejak dahulu mendominasi di Jateng karena itulah mengapa di Jawa Tengah PDI selalu menang menurut hasil *real count* dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) PDIP memang masih menang namun,

⁵⁰ Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 46.

perolehan suaranya turun dibandingkan hasil pemilu sebelumnya yakni pada tahun 2019. Sekarang PDIP mendapatkan 27,35% sedangkan tahun sebelumnya mendapatkan perolehan suara 29,56%.⁵¹

4. Identitas Generasi

Identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa sehingga dapat disebut sebagai kepribadian bangsa. Manusia akan mengalami masa sulit jika mereka tidak berinteraksi dengan orang lain. Kebiasaan atau tingkah laku dan sifat unik yang diciptakan oleh interaksi antar manusia membentuk perbedaan individu. Oleh karena itu, identitas nasional tidak dapat dipisahkan dari sifat bangsa dan masyarakatnya. Hakikatnya adalah nilai-nilai budaya membentuk identitas nasional dan ini dapat dilihat dalam hal sistem desentralisasi seperti dari segi etika dan moral, atau mitos dan tradisi bagian dari bangsa Indonesia sedangkan nasional adalah sesuatu yang Identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa sehingga dapat disebut sebagai kepribadian bangsa. Manusia akan mengalami masa sulit jika mereka tidak berinteraksi dengan manusia lain. Kebiasaan atau tingkah laku dan sifat unik yang diciptakan oleh interaksi antar manusia membentuk perbedaan individu. Oleh karena itu identitas nasional tidak dapat dipisahkan dari sifat bangsa dan masyarakatnya. Identitas nasional Indonesia dapat dilihat dalam hal-hal seperti sistem desentralisasi, nilai-nilai moral dan etika, serta mitos dan tradisi. Perlu diingat bahwa identitas nasional adalah sesuatu yang

⁵¹ Oktaviano, "Update Real Count Pileg 2024, Suara PDIP di Jateng Turun Tipis dibandingkan 2019", <https://m.harianjogja.com>. Diakses 2 Maret 2024.

terbuka dan berkembang sesuai dengan keinginan dan kemajuan masyarakat. Pancasila sebagai pilar identitas nasional dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan.⁵²

Semua generasi memiliki pengalaman dan perspektif unik yang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dan perkembangan teknologi pada masa mereka. Dr. Alexis Abramson dari BBC menyatakan bahwa pembagian generasi akan mempengaruhi persepsi, kebiasaan, perilaku dan kebiasaan.

Di Indonesia, menurut sensus penduduk pada tahun 2023 badan pusat statistik mengelompokkan populasi Indonesia dalam enam Generasi, yaitu: post Generasi Z, Generasi Z, Milenial, Generasi X, baby boomer dan Pre Bommer. Dalam sensus penduduk 2023 Gen z dan Milenial mendominasi penduduk Indonesia yang mencapai 275.773.774 Jiwa. Sedangkan dalam pembagian sensus penduduk pada tahun 2020 antarlain: Gen Z berjumlah 74,3 juta jiwa. Milenial 69,38 juta jiwa. Milenial menjadi penduduk urutan kedua. Sedangkan Gen X 58,65 juta jiwa, Baby Bommer 31,01 juta jiwa, Post Gen Z 29,17 juta jiwa dan Pre Bommer 5,03 juta jiwa.⁵³

Pada gelaran Pemilu 2024, 57% dari total pemilih adalah pemilih muda yaitu Gen Z dan Milenial. Dengan jumlah setengah lebih dari total pemilih, preferensi politik anak muda dinilai akan mempengaruhi jalannya dinamika politik menuju pemilu. Hal ini setidaknya berkaitan

⁵² Shalahudin Pasha dkk, "Upaya Mengatasi Krisis Identitas Nasional Generasi Z Di masa Pandemi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No 2, 2021, hlm. 654-655.

⁵³ Muhtar, "Mengenal 6 Macam Generasi di Indonesia Sesuai Tahun Lahir,Kamu Termasuk Yang Mana", <https://uici.ac.id>. Diakses 10 Februari 2024.

dua hal. *Pertama*, persepsi & preferensi anak muda terhadap politik secara umum dinilai penting untuk memotret derajat partisipasi politik anak muda. *Kedua*, persepsi dan preferensi anak muda terhadap aktor politik dinilai akan mempengaruhi strategi kampanye yang digunakan aktor politik menuju pemilu.⁵⁴

Namun ada beberapa juga yang memilih calon pemimpin karena memilih pemimpin berdasarkan bentuk fisik maupun karakter contohnya istilah gemoy yang digunakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 menjadi cara jitu menarik pemilih secara emosional, khususnya anak muda dan gen Z yang menganggap istilah karena viral dan hal itu lucu tanpa tahu visi misinya.⁵⁵

Setiap generasi mempunyai pandangan politik berbeda-beda contohnya Pre Bommer merupakan generasi yang lahir sebelum 1945, yang mana pada saat itu dunia sedang mengalami krisis global. Di Indonesia, periode ini adalah periode sebelum kemerdekaan. Indonesia masih dalam penjajahan. Oleh karena itu, Pre-Bommer memiliki Jiwa yang tangguh karena hidup di saat kondisi perekonomian global sedang mengalami kesulitan akibat perang dunia. Dari latar belakang tersebut, generasi Pre Bommer memiliki karakter yang sangat loyal terhadap suatu peraturan karena mereka dilahirkan dan dibesarkan pada masa penjajahan yang mana pada saat itu kegiatan apapun yang dilakukan Masyarakat Indonesia pada saat itu diatur oleh Pemerintahan Belanda

⁵⁴ Yolency, "Peran Penting Gen Z dan Milenial Menuju Tantangan Politik Baru Pada Pemilu 2024", www.tubankab.go.id. Di akses 10 Februari 2024.

⁵⁵ Yolency, "Peran Penting Gen Z dan Milenial Menuju Tantangan Politik Baru Pada Pemilu 2024", www.tubankab.go.id. Di akses 10 Februari 2024.

maupun Jepang dalam segi ekonomi, soisial, kebudayaan maupun kegiatan keagaman.⁵⁶

Maka dari itu masyarakat pada masa itu sangat patuh terhadap peraturan yang diterapkan. Adapun para pejuang atau tentara pada saat itu memiliki karakter yang berbeda dari masyarakat umum pada saat itu. Generasi *Baby Bombers* Pre Bommer merupakan generasi yang lahir pada 1946-1964, yang mana pada saat itu dunia sedang mengalami krisis global. Di Indonesia, periode ini adalah periode setelah kemerdekaan. Masyarakat sedang menata sebuah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila. Adapun pada masa itu juga masyarakat Indonesia diterpa masalah terkait Identitas Bangsa. Generasi *Baby Bommer* dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi sehingga mental dan prinsipnya sangat kuat serta berpegang teguh pada loyalitas dan dedikasi.⁵⁷ Keterkaitannya dengan pemilu ini kebanyakan dari generasi ini sudah tidak wajib karena banyaknya faktor usia seperti sudah sakit parah dan mungkin beberapa ada yang sudah meninggal karenanya pandangan politik menurut dua generasi tersebut kurang lebih sama karena mereka mengalami berbagai masa terkait pemilu baik dari presiden pertama maupun sampai presiden yang sekarang.

Kemudian Gen X. Gen X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965-1980 Generasi ini tumbuh pada masa perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Generasi ini dianggap sebagai penghubung

⁵⁶ Muhtar, “Mengenal 6 Macam Generasi di Indonesia Sesuai Tahun Lahir, Kamu Termasuk Yang Mana”, <https://uici.ac.id>. Diakses 10 Februari 2024.

⁵⁷ Tiara Syabanira, “Mengenal Generasi Boomers, X, Y dan Alpha, Seperti apa Kepribadiannya”, <https://www.brainacademy.id>. Diakses 10 Februari 2024.

antara generasi yang lebih tua yang lebih tradisional atau analog dan generasi yang lebih muda yang terbiasa dengan teknologi digital. Adapun karakteristik Gen x antara lain: disiplin dan pekerja keras karakter ini dipengaruhi karena dunia pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi sehingga mereka dituntut untuk lebih pintar dalam mencari peluang dan bisa mengatasi masalah dengan baik.⁵⁸ Generasi ini dinamakan generasi yang cukup matang karena mereka sudah melewati banyak kontestasi pemilu di Indonesia dan mereka cukup bijak dalam menanggapi isu sosial maupun politik.

Generasi Alpha. Generasi alpha atau bisa dikenal dengan Post Gen Z. Generasi ini tumbuh seperti generasi sebelumnya yaitu Gen Z. Yang mana dimudahkannya segala informasi, komunikasi dan lain-lain. Baik dari segala aspek ekonomi maupun sosial. Adapun karakteristik mereka mirip seperti Gen Z. Namun mereka lebih muda dari generasi sebelumnya sehingga masih belum bisa membedakan antara kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder.⁵⁹ Namun generasi ini belum bisa mengikuti pencoblosan karena masih dibawah umur jadi wajar saja jika mereka masih tidak layak memahami isu politik.

5. Identitas Suku

Banyaknya suku yang ada di Indonesia dan memiliki tradisi yang sangat berbeda. suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki garis keturunan dan mengidentifikasi dirinya dari garis keturunan.

⁵⁸ Muhtar, "Mengenal 6 Macam Generasi di Indonesia Sesuai Tahun Lahir,Kamu Termasuk Yang Mana", <https://uici.ac.id>. Diakses 10 Februari 2024.

⁵⁹ Muhtar, "Mengenal 6 Macam Generasi di Indonesia Sesuai Tahun Lahir,Kamu Termasuk Yang Mana", <https://uici.ac.id>. Diakses 10 Februari 2024.

Budaya Indonesia sangat beragam. Data sensus BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 1,340 suku atau etnis. Seringkali, etnis didefinisikan sebagai himpunan manusia (subkelompok manusia) yang dipersatukan oleh kesamaan kultur atau subkultur tertentu, atau karena kesamaan ras, agama, asal usul, daerah atau bangsa, atau bahkan peran atau fungsi tertentu. Setiap kelompok etnis memiliki karakteristik budaya yang unik dan unik, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan banyak keragaman. Karena keragaman ini merupakan bagian dari kekayaan bangsa, harus dilestarikan.⁶⁰

Dari ribuan suku tersebut, suku yang paling banyak populasinya adalah suku Jawa yang memiliki presentase sekitar 41% dari total populasi di Indonesia. Kusnanto dalam bukunya menyebutkan jika suku bangsa di Indonesia tentu saja memiliki beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Akan tetapi, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia. Yaitu *Bhineka Tunggal Ika*, yang bermakna “Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Yang artinya meskipun berbeda akan tetapi kita tetap menghargai satu sama lain dan menjaga persatuan Indonesia.⁶¹

Salah satu definisi dari suku bangsa atau kelompok etnik adalah suatu kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi diri dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Pengakuan orang lain akan ciri-ciri budaya, bahasa, agama, perilaku dan karakteristik biologis adalah cara identitas suku ditandai.

⁶⁰ Aqilla Faturajjah dkk, “Gambaran Identitas etnis Remaja Suku Jawa dan Sunda”, *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, Vol.I No.2. 2018 hlm.107.

⁶¹Umam, “Pengertian Suku Bangsa: Pembentukan, Konsep dan Ciri-ciri” <https://www.gramedia.com>. diakses 10 Februari 2024.

Menurut Fredrik Barth (antropolog) menyatakan bahwasanya suku bangsa adalah pengorganisasian sosial mengenai jati diri yang askriptif di mana anggota suku bangsa mengaku sebagai anggota karena dilahirkan oleh orang tua dari suku bangsa tertentu atau dilahirkan di daerah tertentu. Koentjaraningrat mendefinisikan suku bangsa sebagai kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas etnis berdasarkan kesatuan kebudayaan, yang seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Setiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, baik itu dalam bentuk komunitas desa, kota, kekerabatan atau kelompok adat yang lain, memiliki corak yang terutama terlihat oleh orang di luar masyarakat bersangkutan.⁶² Orang yang telah hidup setiap hari di lingkungan kebudayaannya biasanya tidak melihat lagi corak tersebut. Sebaliknya orang yang hidup di luar kebudayaannya biasanya tidak melihat corak tersebut. Corak unik dalam suatu kebudayaan dapat disebabkan oleh bentuk fisik kebudayaan itu sendiri bentuk fisik di antara pranata-pranatanya atau mungkin karena warganya menganut tema budaya tertentu. Sebaliknya corak ini juga dapat disebabkan oleh kompleksitas unsur-unsur yang lebih besar.

Konsep "suku bangsa" mengacu pada suatu kelompok orang yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan "kesatuan kebudayaan", yang seringkali (tetapi tidak selalu) dibantu oleh kesatuan bahasa. Oleh karena itu, "kesatuan kebudayaan" tidak ditentukan oleh orang luar (seperti ahli

⁶² Aqilla Faturojja dkk, "Gambaran Identitas etnis Remaja Suku Jawa dan Sunda", *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, Vol.I No.2. 2018 hlm.107.

antropologi atau ahli kebudayaan dengan metode ilmiah), melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, kebudayaan Sunda dianggap sebagai kesatuan. Hal ini tidak disebabkan oleh fakta bahwa para peneliti etnografi telah menyimpulkan bahwa kebudayaan Sunda berbeda dari kebudayaan Jawa, Banten atau Bali. Sebaliknya orang-orang Sunda sadar bahwa kebudayaan mereka memiliki kepribadian dan identitas unik yang membedakannya dari kebudayaan tetangganya. Ini terutama berlaku untuk bahasa Sunda yang berbeda dengan bahasa Jawa atau Bali. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suku bangsa antara lain:

a. Berdasarkan Sistem Keturunan

Sistem yang melibatkan garis keturunan dari pihak bapak disebut patrilineal seperti yang terlihat pada suku Batak di Sumatra Utara sedangkan sistem yang melibatkan garis keturunan dari pihak ibu disebut matrilineal. Suku Minang di Sumatra Barat adalah yang menggunakan sistem matrilineal. Untuk sistem ketentuan dari kedua belah pihak. Sistem ini dianut oleh banyak suku yang ada di Indonesia salah satunya adalah suku Jawa. Banyak suku di Indonesia. Keseluruhan ada beberapa ratus suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Masing-masing suku bangsa memiliki kekhasannya sendiri seperti yang dimiliki suku Indonesia di timur Indonesia.⁶³

b. Berdasarkan percampuran suku bangsa

⁶³Umam, "Pengertian Suku Bangsa Pembentukan Konsep dan Ciri-ciri", <https://www.gramedia.com>. diakses 10 Februari 2024.

Keanekaragaman suku bangsa Indonesia semakin lengkap karena lebih dari satu ras dan etnis asli suku bangsa Indonesia dicampur dengan berbagai suku bangsa di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah asimilasi suku asli Indonesia dengan suku Tionghoa atau orang-orang dari dataran Eropa. Banyak istilah baru muncul sebagai hasil dari perkawinan dua kelompok etnis tersebut, seperti istilah "orang indo". Di Pulau Jawa ada suku-suku yang sangat populer di Indonesia seperti Jawa dan Sunda. Perbedaan yang ada di antara suku-suku di Indonesia justru memperkuat ikatan di antara mereka.⁶⁴

c. Berdasarkan ciri-ciri Suku Bangsa

Saat seseorang berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari suku tertentu ada simbol-simbol atau karakter yang digunakan untuk menunjukkan perilaku mereka yang sesuai dengan karakteristik suku tersebut. Misalnya atribut fisik atau ras, gerakan tubuh atau wajah, ekspresi budaya, nilai-nilai budaya dan keyakinan keagamaan. Seseorang yang dilahirkan dalam keluarga suku bangsa harus hidup dengan berpedoman pada kebudayaan suku bangsanya sebagaimana digunakan oleh orang tua dan keluarganya dalam merawat dan mendidiknya, sehingga menjadi manusia sesuai dengan gagasan kebudayaannya.

Keidupan Masyarakat Suku bangsa satu dengan lainnya terdapat perbedaan-perbedaan antara lain:

⁶⁴Umam, "Pengertian Suku Bangsa Pembentukan Konsep dan Ciri-ciri", <https://www.gramedia.com>. diakses 10 Februari 2024.

Perbedaan bahasa seperti bahasa Sunda, Jawa, madura, Bali, Batak, Papua, Padang, Melayu dan lainnya bahkan juga ada bahasa alus dan kasarnya seperti Jawa dan Sunda.

- 1) Perbedaan kesenian daerah seperti, seni musik, seni lukis, seni tari, seni ukir maupun seni pahat.
 - 2) Perbedaan adat-istiadat dalam upacara pernikahan, upacara ritual baik yang berkaitan dengan masalah agama maupun adat itu sendiri dan hukum adat.
 - 3) Perbedaan tata susunan kekerabatan atau kekeluargaan, ada beberapa istilah yaitu matrilineal, patrilineal dan parental.
 - 4) Perbedaan pakaian seperti bangsawan dan masyarakat awam
 - 5) Perbedaan seni bangunan tempat tinggal, peralatan pekerjaan dan lain-lain.
6. Identitas Sosial

Identitas individu atau identitas personal, adalah hasil dari bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dari perspektif orang lain. Sedangkan identitas kelompok atau identitas sosial, terdiri dari karakteristik tertentu yang membedakan seseorang dari orang lain. Ciri-ciri fisik seperti wajah dan tinggi badan atau karakteristik psikis semuanya dapat menjadi bagian dari identitas sosial.⁶⁵

Teori identitas sosial merupakan sebuah analisis psikologi sosial mengenai proses pembentukan konsep diri dalam konteks keanggotaan

⁶⁵ Budi Santoso, "Bahasa dan Identitas Budaya", *Jurnal Sabda*, Vol. 1, No.1 2006, hlm. 44-45.

di dalam sebuah kelompok proses-proses yang berlangsung dalam kelompok dan hubungan antar kelompok satu dengan yang lainnya. Metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku kolektif ditentukan oleh kumpulan aturan, nilai, karakteristik atau pola perilaku yang berkembang dan ditetapkan secara kolektif dalam sebuah kelompok, dan tidak dapat dipahami dan dijelaskan hanya dengan merujuk pada proses yang terjadi di tingkat individu atau interaksi antar individu lain. Menurut teori ini, perilaku seseorang ditentukan oleh perasaan mereka sebagai anggota kelompok bukan ditentukan oleh pilihan mereka sendiri.⁶⁶ Oleh karena itu identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengalamannya sebagai anggota kelompok, di mana dia secara sengaja mengintegrasikan nilai-nilai, berpartisipasi dan mengembangkan rasa peduli dan kebanggaan terhadap kelompoknya.

Identitas sosial bisa menjadikan terpecah belahnya suatu kelompok. Selain itu akan membagi dunia sosial menjadi dua sisi yang saling berlawanan dalam hubungan ingroup atau outgroup, yang pada gilirannya dapat menyebabkan antagonisme dalam kelompok, kategorisasi diri juga memiliki manfaat lain, yaitu memberi individu kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam hubungan sosial dengan cara yang terukur dan terkontrol. Identitas sosial berasal dari internalisasi nilai-nilai kelompok ke dalam pikiran individu, yang memberinya

⁶⁶ Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 2.

sumber dan rasa aman saat berinteraksi dengan orang dari kelompok lain.⁶⁷

Dalam konteks sosial perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain karena semua orang hidup dalam masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat. Perilaku manusia dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya, seperti tunduk pada aturan, tunduk pada norma masyarakat, dan ingin mendapat respons dari orang lain.⁶⁸ Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Karenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ada kebutuhan antar manusia lainnya. Karena manusia tidak akan bisa hidup individu karena ia perlu pertolongan manusia lainnya. Manusia berbeda dengan hewan, untuk bertahan hidup ia dibekali dengan akal. Sedangkan hewan hanya dibekali dengan insting atau naluri.⁶⁹

Model kategorisasi diri, perbandingan sosial, dan interaksional termasuk dalam model pembentukan identitas sosial. Model pertama muncul lebih awal dan dianggap sebagai model mainstream dari perspektif identitas sosial sementara model terakhir muncul sebagai revisi atau lebih tepatnya penyempurnaan dari asumsi-asumsi atau kecenderungan-kecenderungan yang menghasilkan hubungan antar kelompok yang tidak menyenangkan.⁷⁰

Teori perbandingan sosial berpendapat bahwa setiap orang memiliki kecenderungan untuk membandingkan dirinya dengan orang

⁶⁷ Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.12.

⁶⁸ Elly M Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 63.

⁶⁹ Elly M Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar...*, hlm. 64.

⁷⁰ Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial...*, hlm. 23.

lain yang memiliki karakteristik dan sifat yang sebanding untuk mendapatkan persepsi positif tentang dirinya sendiri. Teori ini menganggap semua orang sebagai homogen.⁷¹ Dalam kasus ini juga berkaitan dengan pemilihan calon pemimpin harus sesuai dengan karakter yang diinginkan kebanyakan masyarakat. Contohnya responsif menangani berbagai masalah yang ada di masyarakat seperti isu politik.

Karena identitas sosial terbentuk melalui tindakan dan komunikasi individu dalam kelompok. Namun, jika dilihat dari proses yang melatarinya, identitas sosial selalu terbentuk dalam konteks yang membutuhkan pengupayaan konsensus dan kebutuhan terhadap identitas bersama. Identitas sosial tidak dapat terbentuk jika tidak ada konsensus dan kebutuhan untuk identitas bersama di antara anggota kelompok.⁷²

B. Konsep Masyarakat Sipil

1. Sejarah Masyarakat Sipil

Terkadang, istilah "masyarakat madani" dikaitkan dengan "masyarakat sipil" atau (*civil Society*). Masyarakat madani adalah tatanan sosial yang kuat yang dibangun pada prinsip moral untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.⁷³

Secara operasional, istilah "masyarakat sipil" mengacu pada institusi non-pemerintah yang ada di masyarakat. Institusi-institusi ini

⁷¹Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial*. (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 28

⁷²Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial...*, hlm. 34-35

⁷³Monica Ayu Caesar, "Perbedaan Civil Society dan Masyarakat Madani", <https://nasional.kompas.com>. Diakses 14 Februari 2024.

termasuk organisasi sosial dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, kelompok kepentingan, dan organisasi lainnya yang berusaha untuk menjadi independen.⁷⁴

Tempat di mana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah negara dan di mana masyarakat Sipil berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik adalah ciri khas masyarakat madani. Meskipun demikian, masyarakat sipil berarti komunitas kota yang berperadaban maju. Beberapa ahli mendefinisikan masyarakat sipil sebagai komunitas yang berbudaya dan beradab. Meskipun sering dianggap sebagai satu kata, ada banyak perbedaan antara keduanya. Ada beberapa hal yang membedakan masyarakat sipil dari masyarakat madani yaitu:

a. Perbedaan secara historis

Selama bertahun-tahun, konsep masyarakat madani tidak pernah dikaitkan dengan masyarakat sipil. Perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadapi ketidaktahuan akan petunjuk ilahi (jahiliyyah) masyarakat Arab Quraisy di Mekkah adalah awal masyarakat madani. Untuk memastikan bahwa setiap kelompok orang yang tinggal di Kota Madinah memiliki hak yang sama untuk melaksanakan ibadah agama mereka, Nabi Muhammad mendukung pemerintahan tersebut.⁷⁵

⁷⁴ Otho H Hadi, "Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokrasi", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 14. No 2. hlm. 118. 2010

⁷⁵ Monica Ayu Caesar, "Perbedaan Civil Society dan Masyarakat Madani", <https://nasional.kompas.com>. Diakses 14 Februari 2024.

Piagam Madinah, yang merupakan perjanjian antara umat Islam untuk melaksanakan syariat agama dengan perlindungan hukum, dibuat sebagai hasil dari perjuangan Nabi Muhammad. Namun, masyarakat sipil muncul dari keinginan masyarakat untuk melepaskan diri dari otoritas monarki atau penguasa. Ini muncul selama revolusi Perancis pada abad ke-18. Sedangkan Individu yang memperoleh kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian dalam kehidupan ekonomi dan sosial mereka, yang menunjukkan konsep masyarakat sipil.⁷⁶

b. Perbedaan Konsep Masyarakat sipil dan Masyarakat madani

Konsep kegotongroyongan yang diutamakan oleh masyarakat sipil adalah nilai kemanusiaan. Sementara itu, masyarakat madani tampaknya hanya mendengarkan perintah penguasa dan tidak terlibat secara aktif dalam membangun pemerintah. Sementara masyarakat Madani bergantung pada prinsip keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, Namun, masyarakat Sipil bergantung pada prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Modernitas menghasilkan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dianggap sebagai gerakan masyarakat sekuler yang menjauh dari Tuhan, sementara masyarakat madani berasal dari asuhan dan petunjuk Tuhan. Oleh karena itu, masyarakat madani dianggap sebagai masyarakat yang toleran dan terbuka yang berasal dari Tuhan.⁷⁷

⁷⁶Monica Ayu Caesar, "Perbedaan Civil Society dan Masyarakat Madani", <https://nasional.kompas.com>. Diakses 14 Februari 2024.

⁷⁷Monica Ayu Caesar, "Perbedaan Civil Society dan Masyarakat Madani", <https://nasional.kompas.com>. Diakses 14 Februari 2024.

c. Perbedaan Sistem budaya

Masyarakat madani mengacu pada tradisi Arab-Islam, sedangkan masyarakat sipil mengacu pada tradisi Barat yang tidak beragama Islam. Ini menimbulkan makna yang berbeda jika dilihat dari sejarah munculnya kedua istilah tersebut.

2. Karakter Masyarakat Sipil

Ada Beberapa karakteristik yang membedakan masyarakat sipil dari masyarakat umum adalah sebagai berikut.⁷⁸

- a. Integrasi antar individu dan kelompok hanya terjadi melalui aliansi sosial dan kontrak sosial.
- b. Kekuatan yang ada di masyarakat Sipil menyebar. Dengan demikian, dengan adanya kekuatan alternatif, kepentingan yang dominan dapat dikurangi.
- c. Adanya program pembangunan yang didominasi oleh negara atau pihak pemerintah, serta program lain yang didominasi oleh masyarakat.
- d. Adanya akses ke hubungan antara kepentingan negara dan individu. Karena anggota organisasi relawan dapat berkontribusi pada keputusan pemerintah.
- e. Munculnya loyalitas, kesetiaan, dan kepercayaan sehingga setiap orang menyadari bahwa mereka berhubungan dengan orang lain dan tidak memprioritaskan kepentingan mereka sendiri.

⁷⁸Umam, "Pengertian Masyarakat Madani, Ciri-ciri Karakteristik dan Sejarahnya", www.gramedia.com. Diakses 14 Februari.

- f. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sosial dari berbagai sudut pandang memberikan kebebasan kepada masyarakat.
- g. Hidup dalam keadaan tenang dan aman. Karena itu, setiap anggota masyarakat madani, baik individu maupun kelompok, sangat menghormati dan menghargai satu sama lain.
- h. Saling tolong menolong tanpa mengganggu urusan pribadi seseorang yang dapat mengurangi kebebasan mereka.
- i. Toleransi berarti mereka tidak akan mengganggu urusan orang lain yang sudah memiliki kebebasan. Selain itu, mereka tidak akan merasa terganggu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.

C. Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1. Sejarah Politik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

a. Nahdlatul Ulama

NU adalah sebuah organisasi yang didirikan sebagai *Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah* (organisasi keagamaan masyarakat) untuk menjadi wadah penunjang para ulama dan pengikutnya. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ary pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya.⁷⁹ Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 yang diadakan di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984 memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926 dan mengadopsi pancasila sebagai

⁷⁹ Soeleiman Fadeli, *Analogi NU (Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah)*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 6.

dasar organisasi. Keputusan ini menunjukkan bahwa NU secara organisatoris telah memutuskan untuk meninggalkan politik praktis dan kembali ke garis perjuangan (Khittah), yang telah disepakati oleh para pendiri organisasi pada awal berdirinya tahun 1926.⁸⁰ Selain itu, keputusan ini menyebabkan kembalinya otoritas ulama dalam kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Meskipun nama organisasi secara harfiah berarti kebangkitan Ulama, tetapi ada kecenderungan bahwa peran ulama secara bertahap tersisihkan oleh kelompok politisi sejak NU menjadi partai politik pada tahun 1952. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Khittah NU pada tahun 1984. NU adalah organisasi sosial keagamaan yang berfungsi untuk mempromosikan pendidikan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat, serta untuk menghindari subordinasi terhadap partai politik apa pun.⁸¹

Keputusan tersebut telah mengundang perhatian dan cukup mengejutkan banyak kalangan, paling tidak karena dua alasan. Pertama, karena NU merupakan ormas Islam yang pertama menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas di satu pihak, meskipun di pihak lain, secara formal sesungguhnya belum ada ketentuan yang mengharuskan ormas apapun untuk menerima Pancasila sebagai asas organisasi, karena pada saat itu kewajiban tersebut baru berlaku bagi organisasi-organisasi politik. Dengan kata lain NU telah mendahului mengambil sikap politik akomodatif dalam merespon kebijakan

⁸⁰ Soeleiman Fadeli, *Analogi NU (Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah)*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 6.

⁸¹ Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 1.

pemerintah tanpa harus menunggu adanya perangkat aturan formal apapun yang mewajibkan suatu ormas untuk berdasarkan Pancasila.⁸²

Kedua, adanya perubahan sikap politik yang dramatik berkenaan dengan kebijakan pemerintah orde baru, dari konfrontatif menjadi akomodatif. Meskipun, jika ditelusuri kenyataannya tersebut sesungguhnya merupakan rangkaian mata rantai dari dinamika sejarahnya yang cukup panjang. Sejak masa kelahirannya tahun 1926, dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, kebijakan-kebijakan politik yang diambilnya tidak jarang mengundang kesan adanya sikap mendua dan tidak konsisten. Termasuk dalam penilaian ini adalah fenomena munculnya sejumlah partai politik dari kalangan kaum *Nahdliyin* menjelang pemilu 1999, terutama ketika dikaitkan dengan keputusan kembali ke *Khittah* 1926 yang dengan tegas telah menarik diri dari keterlibatannya pada kegiatan politik praktis.⁸³ Dalam kerangka politik, realitas politik seperti yang dilakukan NU diatas menggambarkan adanya proses dan fungsi yang dilaluinya sesuai dengan tuntutan situasional.

b. Muhamadiyah

Salah satu organisasi sosial-keagamaan Islam di Indonesia yang berdiri pada awaal abad ke-20 M dan mampu bertahan, bahkan menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang luar biasa hingga

⁸² Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 2.

⁸³ Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama...*, hlm. 2.

masuk abad ke 21 M sekarang adalah muhammadiyah. Organisasi ini di dirikan oleh KH. Ahmad dahlan pada 18 November 1912.

Alasan KH. Ahmad Dahlan mendirikan persyarikatan Muhammadiyah Karena permintaan dari siswa dan guru dari beberapa sekolah tempat KH. Ahmad Dahlan mengajar, dia mendirikan sebuah persyarikatan untuk mencapai cita-cita pembaruan agama Islam. Kyai Dahlan sangat terkesan dengan keadaan masyarakat muslim Indonesia pada masa itu yang terbelakang, miskin, dan bodoh, serta menerima dakwah misionaris Kristen.⁸⁴

Selain sebagai tanggapan terhadap aktivikasi missionaris Kristen, terutama karena tiga komponen utama. *Pertama*, kebodohan dan keterbelakangan umat Islam Indonesia dapat ditemukan hampir di semua aspek kehidupan mereka. *Kedua*, meskipun negara kaya akan sumber daya alam, orang-orang di sana hidup dalam kondisi kemiskinan yang cukup parah. *Ketiga*, sistem pendidikan dan kondisi terlihat seperti pesantren masa lalu (kuno).⁸⁵

Cita-cita Kyai Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah, ialah:

- 1) Agar orang Islam di Indonesia dapat mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal tauhid, akhlak, ibadah, dan perilaku agama.
- 2) Umat Islam dari berbagai suku harus bersatu padu

⁸⁴ Suwarno dan Asep Daud, *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1-2.

⁸⁵ Suwarno dan Asep Daud, *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah di Banyumas...*, hlm. 2.

3) Umat Islam harus berani mengorbankan apa pun, termasuk jiwa, harta, dan pikiran mereka, untuk kemajuan dan keluhuran agama Islam.

Muhammadiyah bukan organisasi politik dan tidak akan pernah berniat menjadi partai politik. Namun, dalam perjalanannya, Muhammadiyah selalu berhubungan dengan kehidupan politik, bahkan secara tidak langsung. Namun, organisasi keagamaan ini telah memengaruhi politik Indonesia sejak didirikan 96 tahun yang lalu. Dari pertempuran untuk mendapatkan kemerdekaan hingga pergantian berbagai jenis pemerintahan, dari yang paling lama hingga yang paling baru.

Pada tahun 1945 tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan Syarikat Islam dan lainnya. Mendirikan Majelis syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Partai ini berideologi Islam, kemudian NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952, pada tahun 1960 Pemerintah melarang partai Masyumi karena adanya keterlibatan tokoh-tokohnya dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).⁸⁶ Kemudian pada 1968 beberapa Tokoh Muhammadiyah mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang partai ini gabungan dari beberapa mantan anggota Masyumi. Sampai pada hasil muktamar Muhammadiyah ke 38 di Ujung Pandang memutuskan organisasi ini berfokus pada gerakan dakwah Islam. Adapun pada tahun 1998 ketua umum Pengurus Pusat Muhammadiyah pada waktu itu yakni, Amin

⁸⁶ Nibras Nada, "Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia", *www.kompas.com*. diakses 11 Februari 2024.

Rais, mendirikan Partai Amant Nasional partai ini mengikuti pemilu untuk pertama kali pada tahun 1999 dengan memperoleh 34 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi fokus Muhammadiyah kepada aspek kehidupan seperti faktor Pendidikan, Ekonomi dan lainnya Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan tujuan agar negara tetap berjalan dengan konstitusi dan cita-cita dari leluhur bangsa.⁸⁷

2. Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Politik di Indonesia

a. Nahdlatul Ulama

Di Indonesia pada awal abad ke-20, kelompok Islam tradisional menghadapi ancaman dari kelompok Islam pembaharu atau modernis, yang mengadopsi gagasan pembaharuan dari tokoh Islam modernis Arab. Seperti yang dipegang oleh kelompok Islam tradisional, kelompok Islam modernis berusaha untuk menghapus sikap taklid dalam beragama. Menurut kelompok modernis, ibadah keagamaan yang dilakukan oleh kelompok Islam tradisional tidak didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah Nabi, seperti tahlilan, ziarah, dan bertawasul. Amalan ini dianggap sebagai perbuatan syirik dan menyekutukan Allah. Kelompok Islam modernis berpendapat bahwa kelompok Islam tradisional bertanggung jawab atas kerusakan

⁸⁷ Rina Widiastuti, "Kiprah Muhammadiyah di Kanca Politik dari Masa ke Masa", <https://www.nasional.tempo.co>. diakses 14 Februari 2024.

ekonomi umat Islam saat Eropa Kristen, Cina, Arab, India, dan Belanda menjajahnya.⁸⁸

Dimulai dengan pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam di daerah Minangkabau, kemudian pendidikan Islam oleh orang Arab di Indonesia. Kebangkitan Islam segera terlihat dengan munculnya organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Namun Kaum tradisional memiliki perasaan kolektif dalam suatu organisasi karena mereka mempertahankan adat istiadat dan kebiasaan keagamaan mereka.

Kaum tradisional merasa tersisihkan dari budaya politik karena konflik antara penjajah Belanda yang semakin mengancam umat Islam. Karena ancaman nyata dari pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam, pertikaian di antara mereka mereda. Oleh karena itu, KH. Hasyim Asyari mengajak umat Islam untuk berkumpul untuk memikirkan nasib agama dan umat Islam untuk menghindari kolonialisme. KH. Hasyim Asyari memulai rekonsiliasi sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintahan Belanda.⁸⁹

Fakta bahwa negara asing telah menguasai Indonesia menyebabkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pemerintahan. Islam muncul dalam berbagai gerakan karena ulama tradisional dan masyarakat menentang pemerintahan penjajah Belanda dan Jepang dan menuntut kemerdekaan untuk

⁸⁸ Kholid Mawardi dan Imam Hidayat, *Relasi Sosial Politik Nadlatul Ulama Pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942*, (Banyumas: Rizquna, 2023). hlm. 85-86.

⁸⁹ Kholid Mawardi dan Imam Hidayat, *Relasi Sosial Politik Nadlatul Ulama Pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942...*, hlm. 87.

masa depan Indonesia. Digunakan untuk melawan kolonialisme, Islam digunakan sebagai gerakan politik, sosial, budaya, dan intelektual. Bentuk-bentuk gerakan tersebut adalah umat Islam dianggap sebagai agama yang dinamis melalui cara sosialisasi, adaptasi, dan modifikasi, sehingga Islam tersosialisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.⁹⁰

Pada akhirnya, di tahun 1937, para pemimpin Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah setuju untuk membentuk lembaga yang akan melindungi dan menjaga kepentingan umat Islam. Ini disebut Majelis Islam A'laa Indonesia. Pada tahun 1939, Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari GAPI (Gabungan Partai Politik Indonesia), yang mengusulkan untuk Indonesia Berparlemen kepada pemerintah Hindia Belanda.⁹¹ Dari situlah NU memulai memasuki ranah politik dengan tujuan agar mensejahterkan Masyarakat.

b. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang dilakukan di lapangan kultural (masyarakat), bukan struktural (politik). KH. Ahmad Dahlan sendiri tidak pernah membangun apa yang disebut sebagai "ideologi politik" Muhammadiyah selama kepemimpinannya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak pernah memikirkan bagaimana Muhammadiyah seharusnya melihat politik, apalagi terlibat dalam politik. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak dirancang untuk

⁹⁰ Kholid Mawardi dan Imam Hidayat, *Relasi Sosial Politik Nadlatul Ulama Pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942*, (Banyumas: Rizquna, 2023). hlm. 87-88.

⁹¹ Kholid Mawardi dan Imam Hidayat, *Relasi Sosial Politik Nadlatul Ulama Pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942*, hlm. 88.

berpartisipasi dalam politik. Cara Muhammadiyah melihat politik baru dipikirkan pada tahun 1938 selama masa Mas Mansur. Mas Mansur adalah orang pertama yang membuat ideologi politik Muhammadiyah, yang mencakup pandangan politik dan aturan untuk bagaimana anggota Muhammadiyah harus berpolitik. Setelah itu, sikap politik Muhammadiyah dirumuskan dalam setiap Muktamar atau Tanwir.⁹² Selanjutnya, baik secara individual maupun organisasional Muhammadiyah mulai banyak memformulasikan fatsun politiknya. Secara formal organisasional, Muhammadiyah sejak lama memiliki rumusan tentang fatsun politiknya, ketika itu Mas Mansur mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Islam Indonesia (PII) setelah merangkap sebagai Ketua PP Muhammadiyah, itulah merupakan fatsun politik. Demikian juga ketika dia mengusulkan rumusan yang kemudian disetujui Tanwir 1939 bahwa bagi Muhammadiyah. Politik itu penting akan tetapi tidak menjadi bidang garapan Muhammadiyah dan jika orang Muhammadiyah ingin berjuang di bidang itu, maka harus dibuatkanlah wadah atau lembaga tersendiri. Yang berada diluar organisasi Muhammadiyah yang tidak berhubungan secara organisasional atau kelembagaan dengan Muhammadiyah, akan tetapi harus bisa bekerja sama. Dalam mengembangkan lembaga

⁹² Hajriyanto Y Tohari, *Muhammadiyah dan Pergulatan Politik Islam Modernis*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2005), hlm. 120.

atau wadah politik tersebut harus bekerjasama dengan kekuatan umat lainnya.⁹³

Achmad Jainuri mengatakan dalam diskusi tentang budaya politik, ada tiga hal yang membuat masalah budaya politik tidak dapat dihindari: *pertama*, warga Muhammadiyah telah lama menganut politik adiluhung, juga dikenal sebagai high politics. Bagaimana proses ini digunakan untuk menegakkan sebuah sistem yang berbasis agama. Sebaliknya, banyak warga Muhammadiyah yang terlibat dalam politik kepartaian, yang sering disebut politik rendah. Pemaknaan pragmatis, pragmatis, dan transaksional lebih sering ditemukan dalam tradisi politik.⁹⁴

Kedua, etika politik politisi Muhammadiyah. Saat ini, politisi Muhammadiyah menghadapi masalah yang sulit. Misalnya, politisi Muhammadiyah dihadapkan pada pertanyaan tentang moralitas perilaku politik mereka saat melihat keadaan politik modern. Achmad Jainuri berpendapat bahwa masalah seperti itu jelas bertentangan dengan perspektif etika politik para politisi Muhammadiyah. Namun, masalahnya adalah apakah politisi Muhammadiyah dapat melakukan nahi munkar untuk mencegah tindakan politik yang tidak etis atau membiarkan imoralitas politik terjadi begitu saja. *Ketiga*, itu berkaitan dengan kebiasaan politik Muhammadiyah. Muhammadiyah memang tidak memiliki wajah

⁹³ Hajriyanto Y Tohari, *Muhammadiyah dan Pergulatan Politik Islam Modernis...*, hlm. 121

⁹⁴ Habib Asha Kurniawan, "Muhammadiyah dan Politik", <https://muhammadiyahponorogo.or.id>. diakses 14 Februari 2024.

politik sejak awal. Oleh karena itu, orang yang tidak berafiliasi dengan Muhammadiyah mengalami kesulitan untuk memahami tradisi politik Muhammadiyah.⁹⁵

Sedangkan menurut pandangan ulama Imam Al-Mawardi memiliki pandangan dan pemikiran yang mendasarkan kepada aliran Syafiiyah, serta pendasaran teologis beliau beraliran sunni yang kemudian tercermin pada beberapa karya yang telah dimaktubkannya dalam bentuk kitab-kitab klasik. Salah satu contoh implementasi reflektif pemikiran sunni Imam Al-Mawardi pada konteks historis adalah dalam hal mempertahankan *status quo* terhadap realitas politik pada kehidupan di zamannya.⁹⁶

Dalam hal pemikiran hukum secara prinsipil berdasarkan teks adalah sebagaimana dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyah* untuk praktik ketatanegaraan dilandasi oleh kontrukksi dari pemikiran *khalifah* (konsep perwakilan kuasa tuhan di bumi). Hal tersebut relvan dengan teks hukum al-qur'an sebagaimana berikut

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

“ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” (Qs. Al-Baqarah:30).

⁹⁵ Habib Asha Kurniawan, “Muhammadiyah dan Politik”, <https://muhammadiyahponorogo.or.id>. diakses 14 Februari 2024.

⁹⁶ M. Layen Jumaidi, “Pandangan Politik al-Mawardi”, *Jurnal Mimbar*, Vol. XIX. No.12. 2003, hlm. 139.

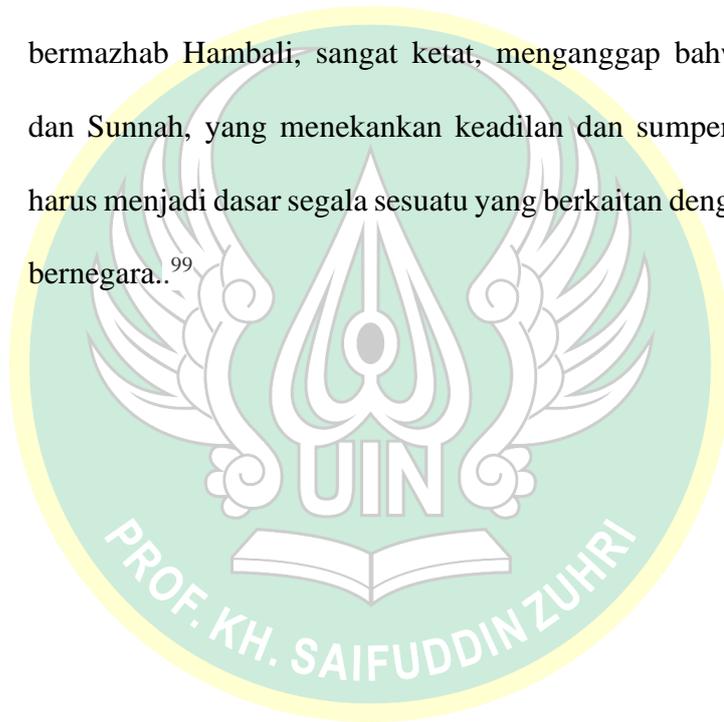
Secara eksplisit teks tersebut dimaknai bahwa konsep kekuasaan umat manusia merupakan cerminan dari kekuasaan Allah SWT. Sehingga dapat diartikan bahwa kekuasaan sebagai bagian dari prinsip Amanah yang harus dijalankan oleh umat manusia dalam membangun peradaban dunia. Konsep kekuasaan memiliki dua tujuan yakni. *Pertama*, bertujuan untuk pengabdian kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi seperti manusia secara adil tanpa melihat dari identitas dan yang *Kedua*, yang berkaitan dengan pengabdian terhadap tuhan.⁹⁷

Imam al-Mawardi menganggap negara sebagai bentuk dimensi. Kehidupan manusia, baik duniawi maupun agama, harus dilindungi oleh politik dan hukum negara. Sementara pemikiran politik Ibnu Taimiyah jelas berorientasi pada suatu negara atau pemerintahan yang bersendikan agama, Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa kesalahan para pemimpin menyebabkan kebobrokan umat dan bahwa pemimpin tidak tepat memilih menteri atau pembantu mereka di setiap tingkat pemerintahan.⁹⁸ Oleh karena itu dia menyajikan bahwa suatu contoh atau model pemerintahan menurut islam yang didasarkan pada keyakinan bahwa umat hanya dapat diatur dengan baik oleh pemerintahan yang juga baik.

⁹⁷ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum: Akar Religious Hukum*, (Jakarta: Prenadamrdia, 2015). hlm. 213.

⁹⁸ Supian, “ Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan: Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimmiyah”, *Jurnal Politik Islam*, Vol 3. No. 2, 2020. hlm. 241.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Ibnu Taimiyah mencurahkan lebih banyak perhatian pada proses administrasi negara. bukan pada gagasan atau prosedur pengangkatan pemimpin seperti yang dilakukan al-Mawardi. Dua ulama ini memiliki pemikiran yang sangat berbeda karena perbedaan mazhab mereka. Pandangan Al-Mawardi, yang bermazhab Syafi'i, agak longgar atau lebih fleksibel, sedangkan pandangan Ibnu Taimiyah, yang bermazhab Hambali, sangat ketat, menganggap bahwa Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan keadilan dan sumpermasi hukum, harus menjadi dasar segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bernegara..⁹⁹



⁹⁹ Supian, “ Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan: Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimmiyah”, *Jurnal Politik Islam*, Vol 3. No. 2, 2020. hlm. 246.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pemeriksaan gejala secara hati-hati, tekun, dan menyeluruh untuk meningkatkan pengetahuan manusia, dan metode penelitian adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah.¹⁰⁰

A. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di kantor majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama dan kantor pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu. Penelitian ini kualitatif, artinya datanya tidak berupa angka tetapi kata-kata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok.¹⁰¹ Dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta situasi sosial yang sebenarnya (*Comparative Approach*).

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber penelitian merupakan sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini di dapat dari 2 sumber, yaitu:

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 6.

¹⁰¹ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian hukum: Filsafat, Teori danPraktik*, (Depok, RajaGrafindo, 2018), hlm. 139.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku, dokumentasi, observasi, dan wawancara langsung untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain penelitian yang sudah ada.¹⁰³ Data sekunder dapat berasal dari hasil penelitian sebelumnya dari penelitian lain. Ini dapat berupa rancangan undang-undang, temuan penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁰⁴ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum seperti skripsi yang berkaitan dengan apa yang penulis karang.

C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah segenap Tokoh di Bumiayu atau jajarannya yang melihat atau mengetahui secara langsung terkait implementasi Politik Identitas dalam pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Bumiayu

2. Objek penelitian

¹⁰² Ni Wayan Novi Budiasni, *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa)*, (Bali: Nilacaraka, 2020), hlm. 50.

¹⁰³ Usman Rianse, dan Abdi, *“Metodelogi Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)”*, (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm. 11.

¹⁰⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). hlm. 32.

Objek pada penelitian ini adalah masyarakat sipil dan para tokoh terkait yang mana objek ini berkaitan dengan judul penelitian yang akan penulis bahas.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dengan menggunakan metode observasi, peneliti dapat melihat situasi yang terjadi secara langsung, melihat bagaimana teori digunakan secara langsung, dan memperoleh perspektif responden yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau survei.¹⁰⁵ Dalam metode observasi ini data yang digali adalah tentang data perkara terkait praktik Politik Identitas yang terjadi di Bumiayu prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

2. Wawancara

Wawancara, menurut Bogdan dan Biklen, adalah percakapan yang diarahkan dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian.¹⁰⁶ Dalam penelitian, wawancara adalah proses tanya-jawab yang dilakukan secara lisan antara dua atau lebih orang yang bertatap muka untuk mendengarkan informasi atau keterangan.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai beberapa Tokoh Nahdlatul Ulama dan

¹⁰⁵ A Chaedar Alwaasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Dunia Pustaka Jaya, 2017). hlm. 110- 111.

¹⁰⁶ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119.

¹⁰⁷ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <https://repository.uinmalang.ac.id/>, diakses 20 Desember 2023.

Muhamadiyah terkait Praktik Politik Identitas yang terjadi di Bumiayu.

Adapun narasumber dalam wawancara penelitian ini ialah:

a. Nahdlatul Ulama Kecamatan Bumiayu

1. Bapak Faris selaku Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Bumiayu
2. Gus Mudrik selaku Ketua Ansor Kecamatan Bumiayu
3. Ibu Hamidah selaku Ketua Fatayat Kecamatan Bumiayu

b. Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu

1. Bapak Sukmono selaku Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah
2. Bapak Faqih selaku Tokoh Muhammadiyah Cabang Bumiayu
3. Ibu Siti Khasanah selaku Ketua Aisiyah Cabang Bumiayu

Dalam pada ini, penulis juga menggunakan beberapa metode dalam wawancara Purposive sampling.

Purposive sampling (juga dikenal sebagai judgement, selective atau subyektif sampling) adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memiliki anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian.¹⁰⁸ Dalam purposive sampling penilaian pribadi perlu digunakan untuk memilih kasus yang membantu menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. di mana teknik purposive sampling biasanya digunakan untuk mendapatkan narasumber atau informan yang paling memahami masalah. Di mana penulis memilih pengurus organisasi dan akademisi, sebagai indikator penentuan narasumber.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Sugiyono, "Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel dengan Ciri Khusus dan wajib tahu" <https://www.merdeka.com>. diakses 20 Desember 2023.

¹⁰⁹ Sugiyono, "Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel dengan Ciri Khusus dan wajib tahu" <https://www.merdeka.com>. diakses 20 Desember 2023.

3. Dokumentasi

Dengan Metode dokumentasi. Penulis mendapatkan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data terkait masalah yang akan diteliti. Studi ini mengumpulkan dan mempelajari literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Praktik Politik identitas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kecamatan Bumiayu.

E. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi data, yang, menurut Sugiyono, digunakan untuk menguji keabsahan data penelitian; oleh karena itu, jika metode ini digunakan dalam penelitian, peneliti harus dapat menguji keabsahan data dari masalah yang mereka pelajari sendiri. Metode triangulasi, menurut Djam'an dan Komariah, adalah cara untuk memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara.¹¹⁰ Namun Norman K. Denkin menggambarkan metode triangulasi sebagai gabungan dari berbagai teknik yang digunakan untuk mempelajari fenomena yang saling terkait dari berbagai sudut pandang dan perspektif.¹¹¹

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah:

¹¹⁰ Andarusni Alfansyur, & Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", Universitas Sriwijaya: *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 2020, Vol. 5, No.2, hlm. 148.

¹¹¹ Akbar Muntoha Gufron, dkk, "Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Tes Kemampuan Literasi Numerasi Berdasarkan Newman's Analysis Error", *www.unisula.ac.id*. Diakses 06 Maret 2022.

1. *Content Analysis*

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data, yang merupakan metode analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan objek dengan pola pikir induktif. Dengan kata lain, mereka mengumpulkan dan menyusun data yang mereka butuhkan untuk membuat kesimpulan.¹¹²

2. *Comparative*

Sebuah pendekatan analisis yang dilakukan dengan memeriksa sejumlah faktor yang berkaitan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki, kemudian membandingkan faktor-faktor tersebut satu sama lain.¹¹³ Salah satu cara untuk melakukan perbandingan adalah dengan melakukan perbandingan peraturan perundang-undangan saat ini. Kemudian ini dapat dilakukan dengan membandingkan bagaimana peraturan yang mengatur materi hukum tertentu diterapkan di satu negara atau beberapa negara lain.¹¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan *comparative study* terkait persamaan dan perbedaan implementasi atau sikap Ulama atau tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait Politik yang ada di Bumiayu.

¹¹² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 261.

¹¹⁴ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 86.

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH KECAMATAN BUMIAYU TERHADAP POLITIK
IDENTITAS DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**A. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Bumiayu
Terhadap Praktek Politik Identitas Dalam Kontestasi Pemilihan
Umum**

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam terdapat banyak Ormas Islam, di antaranya yang terbesar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

NU adalah sebuah organisasi yang didirikan sebagai *Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah* (organisasi keagamaan masyarakat) untuk menjadi wadah penunjang para ulama dan pengikutnya. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ary pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya.¹¹⁵

Sementara itu ada Salah satu organisasi sosial-keagamaan Islam di Indonesia yang berdiri pada awaal abad ke-20 M dan mampu bertahan yaitu Muhammadiyah.¹¹⁶ Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 *Dzulhijjah* tahun 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan Ormas Islam yang melaksanakan dakwah

¹¹⁵ Soeleiman Fadeli, *Analogi NU (Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah)*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 6.

¹¹⁶ Suwarno dan Asep Daud, *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1.

dengan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah memandang bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan yang meliputi aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat duniawi yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif.

1. Nahdlatul Ulama

Pandangan Nahdlatul Ulama Bumiayu terhadap praktik politik Identitas?

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Faris tentang Praktik Politik Identitas:

“Sebenarnya Politik Identitas ada, namun sejak ada muktamar di Situbondo NU berkhittah agar tidak menjadi partai politik praktis, adapun beberapa warga NU yang ikut politik juga ada, karena bagaimanapun identitas itu akan terbawa akan tetapi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun kebanyakan Warga NU memilih calon Legislatif berdasarkan identitas warga NU contohnya di PKB ada karena PKB didirikan oleh Kader NU maka warga NU lebih condong ke partai tersebut karena adanya ikatan yang ada pada sesama warga Nahdliyin”.¹¹⁷

Kemudian keterkaitannya dengan dampak Praktik Politik Identitas bagi Masyarakat Sipil, beliau menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya adanya perbedaan karakter dari warga NU ada yang menerima informasi atau apapun dengan langsung dilabeli benar dan ada juga yang memfilter terkait informasi yang benar dan Hoax karena orang yang akademispun belum tentu ada yang abai terkait informasi atau kejadian di khususnya pemilu yang ada di Bumiayu adapun dampak negatifnya politik identitas adanya penghalang dalam kegiatan sosial yang ada di Bumiayu namun

¹¹⁷ Hasil Wawancara Bapak Faris Selaku Tokoh Nahdlatul Ulama Bumiayu Pada Tanggal 24 Februari 2024 Pukul 10:00 WIB.

pada pemilu tahun ini lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya”.¹¹⁸

Sedangkan menurut beliau terkait Pola Ijtihad NU dalam Politik:

“NU berijtihad bersumber dari Al-Qur’an, Hadist, Sunnah Ijma dan Qiyas. Namun Secara Umum NU Mengacu pada perkataan Nabi Muhammad sebenarnya menyarankan apabila memilih pemimpin harus Memiliki sifat sidiq, Amanah, tabligh dan fatonah.”¹¹⁹

Dalam pertanyaan Gus Mudrik tentang Praktik Politik Identitas:

“Pada kontestasi pemilu tahun ini ada praktik tersebut contohnya calon legislative dari PKB dari Fatayat NU, dan pada kenyataannya memang bebrapa partai ada yang beririsan dengan NU, kemudian ini jadi daya Tarik, untuk mendapatkan atensi dari warga NU tersendiri. meskipun secara organisasi tidak. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Karena Sebagian besar warga NU itu melihat pentingnya identitas apabila memilih caleg maka harus tahu identitasnya terlebih dahulu. karena bagaimanapun di NU ketika Masuk politik, mesti NU punya agenda pada bangsa ini begitu pula dengan ormas yang lainnya yang mempunyai tujuan umum untuk mensejahterakan Masyarakat Indonesia”.¹²⁰

Kemudian keterkaitannya dengan dampak Praktik Politik

Identitas bagi Masyarakat Sipil, beliau menyampaikan bahwa:

“Menurutnya apabila caleg dari warga NU jika di lihat dari identitasnya dari sudut pandang diluar warga NU atau orang awam mungkin tidak terlalu berdampak. Namun jika dari kacamata warga Nahdliyin tersendiri apabila pemimpin dari NU. Mungkin menguntungkan bagi organisasi tersebut. Karena akan memprioritaskan sesama warga NU itu tersendiri. Baik yang akademis maupun warga biasa. Karena kita tidak memungkiri adanya money politik yang ada dilapangan. Mengakibatkan suatu keberpihakan.”¹²¹

¹¹⁸ Hasil Wawancara Bapak Faris Selaku Tokoh Nahdlatul Ulama Bumiayu Pada Tanggal 24 Februari 2024 Pukul 10:00 WIB.

¹¹⁹ Hasil Wawancara Bapak Faris Selaku Tokoh Nahdlatul Ulama Bumiayu Pada Tanggal 24 Februari 2024 Pukul 10:00 WIB.

¹²⁰ Hasil Wawancara Gus Mudrik Selaku Ketua Ansor Nahdlatul Ulama Bumiayu Pada Tanggal 26 Februari 2024 Pukul 15:00. WIB.

¹²¹ Hasil Wawancara Gus Mudrik Selaku Ketua Ansor Nahdlatul Ulama Bumiayu Pada Tanggal 26 Februari 2024 Pukul 15:00. WIB.

Sedangkan menurut beliau terkait Pola Ijtihad NU dalam Politik:

“Ijtihad politik warga NU khususnya, baik ditingkatan nasional maupun daerah. Mereka mengikuti apa yang difatwakan oleh Ulama atau kiyai, itu, tetap menjadi suatu acuan. Karena warga NU percaya bahwasanya seorang Ulama itu orang yang memahami masalah apapun. Termasuk dalam berpolitik yang benar. Karena tujuan politik di NU sebagai jembatan atau cara untuk menciptakan kemaslahatan umat”.¹²²

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Hamidah tentang

Praktik Politik Identitas:

“Di Bumiayu tidak terpungkiri politik Identitas itu selalu ada bahkan sudah mendarah daging contohnya dalam hal Ekonomi dan lainnya dimana Perempuan mempunyai sifat yang loyal terhadap prinsip yang ia pegangi dan ikuti. Karena kaum perempuan sumber perolehan suara terbesar dalam pemilihan umum ini”.¹²³

Kemudian keterkaitannya dengan dampak Praktik Politik

Identitas bagi Masyarakat Sipil, beliau menyampaikan bahwa:

“Perempuan sudah tidak menjadi penghalang, untuk memberikan kebijakan public, karena 30% perempuan ada di legislative, yang mana ini menjadi keuntungan untuk hak-hak perempuan meskipun, tidak sebanding dalam presentase kaum laki-laki. Kaitannya dengan dampak dari segi perempuan muda NU yaitu Fatayat lebih bisa memilah mana berita yang hoax dan yang benar, agar tidak ada terbawa opini yang salah. Berbeda dengan masyarakat awam yang tidak tahu informasi yang mengenai fakta dan yang mengenai hoax”.¹²⁴

Sedangkan menurut Ibu Hamidah beliau terkait Pola Ijtihad NU

dalam Politik:

“NU mengikuti ideologi *Ahlusunnah wal jama'ah* selain bersumber dari Al-qur'an dan hadis ada juga Ijma dan qiyas. Karena ijma hasil kesepakatan dari Ulama. Karena Ulama yang

¹²² Hasil Wawancara Gus Mudrik Selaku Ketua Ansor Cabang Bumiayu Pada Tanggal 26 Februari 2024 Pukul 15:00. WIB.

¹²³ Hasil Wawancara Ibu Hamidah Selaku Ketua Fatayat Cabang Bumiayu, Pada Tanggal 1 Maret 2024 Pukul 14:00. WIB.

¹²⁴ Hasil Wawancara Ibu Hamidah Selaku Ketua Fatayat Bumiayu Cabang, Pada Tanggal 1 Maret 2024 Pukul 14:00. WIB.

menjadi acuan dalam pengambilan hukum salah satunya terkait urusan politik dan Ulama adalah perantara dari sabda-sabda Nabi yang kemudian dijadikan sebagai istinbath yang terpercaya. Salah satunya dalam hal politik”.¹²⁵

2. Muhammadiyah

Pandangan Muhammadiyah terhadap Praktik politik Identitas?

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sukmono tentang Praktik Politik Identitas:

“Muhammadiyah membebaskan hak warganya untuk memilih suatu calon pemimpin, namun Ada kader Muhammadiyah juga ada yang mengikuti kontestasi pemilu dengan tujuan untuk menegakan agama ajaran Islam dengan cara politik. adapun pada prakteknya setiap warga Muhammadiyah yang menjadi wakil legislative harus ada sumbangsih terhadap perserikatan Muhammadiyah”.¹²⁶

Kemudian keterkaitannya dengan dampak Praktik Politik Identitas bagi Masyarakat Sipil, beliau menyampaikan bahwa:

“Masyarakat sipil ini memiliki cara berfikir yang berbeda dengan masyarakat biasa, karena mereka beranggapan bahawasannya seorang pemimpin harus memiliki landasan berfikir seperti kemampuan dari segi agama, Ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Adapun dampak lebih baik apabila calon pemimpin mempunyai kemampuan tersebut untuk kemashlahatan umat”.¹²⁷

Sedangkan menurut beliau terkait Pola Ijtihad Muhammadiyah dalam Politik:

“Muhammadiyah hadir di tengah-tengah Masyarakat dalam rangka untuk melaksanakan ajaran agama Islam murni berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist atau Sunnah Nabi dan apabila di kedua sumber tersebut tidak ada penjelasan yang pasti maka bisa menggunakan Pintu Ijtihad yakni masalah

¹²⁵ Hasil Wawancara Ibu Hamidah Selaku Ketua Fatayat Bumiayu, Pada Tanggal 1 Maret 2024 Pukul 14:00. WIB.

¹²⁶ Hasil Wawancara Bapak Sukmono Selaku Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Bumiayu, Pada Tanggal 27 Februari Pukul 11:30. WIB.

¹²⁷ Hasil Wawancara Bapak Sukmono Selaku Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Bumiayu, Pada Tanggal 27 Februari Pukul 11:30. WIB

menyelesaikan suatu masalah, adapun perseikatan Muhammadiyah juga mempunyai suatu lembaga yaitu Majelis tarjih yang membahas terkait berbagai masalah salah satunya masalah politik”.¹²⁸

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Faqih tentang

Praktik Politik Identitas:

“Secara umum lebih baik atau lebih terbuka daripada yang sebelumnya, di Muhammadiyah antara politik dan agama tidak dapat dipisahkan karena politik menjadi salah satu alat dakwah tetapi tidak dicampur dengan organisasi atau persarikatan termasuk di Bumiayu”.¹²⁹

Kemudian keterkaitannya dengan dampak Praktik Politik Identitas bagi Masyarakat Sipil, beliau menyampaikan bahwa:

“Dampak positifnya mungkin ada kesamaan identitas atau perasaan senasib menjadikan rasa solidaritas tinggi. Sedangkan negatifnya menjadikan orang berketergantungan terhadap apa yang diinginkan harus sama dengan identitasnya baik dari bidang agama, budaya dan ekonomi yang sama. Apa bila identitas dikemukakan dengan membabibuta maka kita tidak akan mandiri apabila dijelaskan dengan baik maka akan membuat kita lebih mandiri”.¹³⁰

Sedangka menurut beliau terkait Pola Ijtihad Muhammadiyah dalam Politik:

“Muhammadiyah sangat normative berpegangan dengan Al-Qur’an dan hadis. Seperti sifat Rosul seperti Sidiqh, Amanah, fatonah dan tabligh dalam hal yang berkaitan dengan kepimipinan adapun beberapa yang menjadi rujukannya selain yang disebutkan sebelumnya yakni karya-karya ulama terdahulu seperti Ibnu taimiyah, Al-Ghazali dan bebrapa yang merujuk dari pemimpin rasul ataupun khulafaur rasydin, asal tidak bertentangan denga apa yang ada di Islam”.¹³¹

¹²⁸ Hasil Wawancara Bapak Sukmono Selaku Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Bumiayu, Pada Tanggal 27 Februari Pukul 11:30. WIB

¹²⁹ Hasil Wawancara Bapak Faqih selaku tokoh Muhammadiyah Bumiayu, Pada Tanggal 28 Februari 2024 Pukul 09:00. WIB.

¹³⁰ Hasil Wawancara Pak Faqih selaku tokoh Muhammadiyah Bumiayu, Pada Tanggal 28 Februari 2024 Pukul 09:00. WIB.

¹³¹ Hasil Wawancara Bapak Faqih selaku tokoh Muhammadiyah Bumiayu, Pada Tanggal 28 Februari 2024 Pukul 09:00. WIB.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siti Khasanah tentang Praktik Politik Identitas:

“Aisiyah Bumiayu intens untuk bisa menjadi perempuan yang mandiri dan bisa menjadi contoh atau suri tauladan, bukan menjadi kaum yang lemah bergantung pada kaum lelaki baik dari segi ekonomi atau pendidikan agar tidak mudah terkontaminasi atau terpengaruh politik yang tidak benar”.¹³²

Kemudian keterkaitannya dengan dampak Praktik Politik Identitas bagi Masyarakat Sipil, beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk sekarang sudah sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini terkait jabatan-jabatan kepala atau Pemimpin yang ada di Bumiayu, baik dari bidang Politik Ekonomi ataupun Pendidikan. Hal ini lah yang menjadikan masyarakat Muhammadiyah lebih paham atau tahu dan tidak gampang terprovokasi Namun ada bebrapa yang abai dari isu-isu politik yang mengakibatkan adanya berita hoax”.¹³³

Sedangkan menurut beliau terkait Pola Ijtihad Muhammadiyah dalam Politik:

“Dari Muhammadiyah sering mengintesis kajian-kajian pendalaman materi. Muhammadiyah mengikuti arahan-arahan dari tokoh yang berkotepensi di berbagai bidang untuk memberi bimbingan contohnya di aum (Amal Usaha Muhammadiyah) contohnya di segala bidang seperti Kesehatan, Pendidikan dan lainnya. Yang bersumber dari Ulama yang kompeten dan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis”.¹³⁴

B. Analisis pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu Terhadap Praktik Politik Identitas Bagi Masyarakat Sipil

Jumlah umat islam telah mengalami peningkatan sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Perkembangan ini memungkinkan

¹³² Hasil Wawancara Ibu Siti Khasanah Selaku Ketua Aisiyah Cabang Bumiayu, Pada Tanggal 4 Maret 2024 Pukul 16:00 WIB.

¹³³ Hasil Wawancara Ibu Siti Khasanah Selaku Ketua Aisiyah Cabang Bumiayu, Pada Tanggal 4 Maret 2024 Pukul 16:00 WIB.

¹³⁴ Hasil Wawancara Ibu Siti Khasanah Selaku Ketua Aisiyah Cabang Bumiayu, Pada Tanggal 4 Maret 2024 Pukul 16:00 WIB.

masyarakat untuk mengubah cara mereka menangani berbagai masalah dalam kehidupan seperti sosial maupun ekonomi. Akibatnya masalah yang dihadapi masyarakat menjadi semakin kompleks dan rumit. Kadang-kadang masalah yang muncul saat ini tidak sesuai dengan tata hukum yang ada pada zaman Rasulullah. Dibutuhkan upaya yang mampu menyelesaikan masalah dalam situasi dan kondisi seperti yang ada pada zaman ini maupun zaman yang akan datang. Masyarakat muslim terus menyebar ke berbagai belahan dunia. Mereka hidup dalam budaya yang berbeda-beda yang secara otomatis menuntut perubahan dalam proses penentuan hukum baik dari tata cara pengambilan hukum maupun hasil dari istinbat hukum. Proses ini dilakukan untuk menanggapi peristiwa yang tidak terjadi pada zaman Rasul seperti masalah politik identitas. Ini memicu fase baru ijtihad yang menghasilkan banyak aliran hukum islam (mazhab).¹³⁵ Salah satu masalah yang bisa digali lebih lanjut tentang keabsahan hukum mengenai praktik politik yang berlandaskan identitas sebagai suatu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Politik identitas dapat dipahami sebagai aktivitas politik yang berbasis identitas dalam keterlibatan politik atau sebaliknya memperjuangkan kepentingan dan kebaikan melalui sarana politik. Istilah politik identitas dalam penggunaan secara umum mengacu pada kecenderrungan orang berbagai ras, agama, etnis, sosial atau budaya

¹³⁵ Muhamad Ulil Abshar, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bathsul Masail NU", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 1. No.2, 2016, hlm. 278.

tertentu untuk membentuk suatu aliansi tertentu untuk membentuk aliansi politik yang eksklusif.¹³⁶

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga sempat tergabung dalam suatu politik yang sama yakni Masyumi dan kemudian mendirikan partai sendiri dengan nama sama seperti nama organisasinya. Kemudian NU pada muktamar ke 27 di Situbondo menyatakan kembali ke *khittah* yakni kembali sebagai organisasi masyarakat yang berfokus dalam bidang sosial keagamaan seperti tujuan pertama kali dibentuk. Sama halnya dengan Muhammadiyah akhirnya Masyumi dibubarkan oleh pemerintahan Soekarno akan tetapi Muhammadiyah masih melanjutkan perjuangannya dibidang pendidikan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki peran yang cukup penting di tengah masyarakat yaitu sebagai benteng moralitas, teladan ukuwah dan penyubur batin bagi masyarakat. Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah juga sebagai organisasi masyarakat yang menjadi sumber rujukan kehidupan beragama bagi masyarakat yang berpedoman pada al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas untuk membangun masyarakat agar menjadi sejahtera baik di dunia dan di ahirah. Selain NU dan Muhammadiyah juga memiliki peran dalam bidang lain diantaranya seperti muamalah, sosial maupun politik. Dalam bidang muamalah NU dan Muhammadiyah harus bisa mengarahkan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi dengan cara yang benar sesuai dengan syariat islam misalnya

¹³⁶ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme dan Politik Identitas*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 158

ketika masyarakat tersebut berdagang maka diberikan edukasi untuk tidak mengurangi timbangannya. Sedangkan dalam politik NU dan Muhammadiyah harus bisa memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kebaikan kepada mereka serta menyarankan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan tidak golput dalam pemilihan, karena salah satu kesuksesan dari pemilu adalah adanya partisipasi dari masyarakat.

Dalam kaitannya dengan praktik politik identitas, pengetahuan yang dimiliki oleh tokoh NU dan Muhammadiyah merupakan kekuatan yang sangat potensial digunakan untuk menggalang umat secara keseluruhan guna mewujudkan suatu tindakan atau proses politik tertentu. Hal ini bisa dilihat ketika pemberian suara dalam pemilu baik itu pemilihan Gubernur ataupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat awam bukan hanya memahami sebagai bentuk tindakan politik tetapi lebih ke sebuah tindakan keagamaan bahkan ibadah karena yang memerintahkan adalah salah satu organisasi masyarakat yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Kekuatan demikian yang selanjutnya dimanfaatkan oleh para politisi untuk meraup dukungan.

Di Kecamatan Bumiayu peran dari NU dan Muhammadiyah dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dinamikanya bermacam-macam. Ada beberapa tokoh dari organisasi tersebut yang terjun langsung dengan mengusung salah satu pasangan tertentu secara terang-terangan dan ada juga yang tidak mengusung salah satu pasangan tertentu tetapi hanya mengarahkan atau memberikan pesan secara netral kepada

masyarakat untuk mengikuti pemilu dengan baik dan memilih sesuai kriteria yang dianggap baik dan benar.

Secara garis besar di antara peran NU dan Muhammadiyah tersebut yang paling menonjol adalah melalui ulama atau tokohnya yang mengusung salah satu calon baik secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Misalnya peran tokoh NU di sini bisa dikatakan berhasil untuk memberikan arahan kepada warganya untuk memilih pemimpin seperti yang dikehendaknya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Karena adanya suatu ikatan dalam organisasi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Faris salah satu tokoh NU di Kecamatan Bumiayu:

“Sebenarnya Politik Identitas ada, namun sejak ada muktamar di Situbondo. NU berkhittah agar tidak menjadi partai politik praktis, adapun beberapa warga NU yang ikut politik juga ada karena bagaimanapun identitas itu akan terbawa akan tetapi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun kebanyakan Warga NU memilih calon Legislatif berdasarkan identitas warga NU contohnya di PKB ada karena PKB didirikan oleh kader NU maka warga NU lebih condong ke partai tersebut karena adanya ikatan yang ada pada sesama warga Nahdliyin”.¹³⁷

Sedangkan dari pimpinan Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu dalam pemilihan umum tahun 2024 ini menurut Bapak Sukmono yang mengatakan:

“Muhammadiyah membebaskan hak warganya untuk memilih suatu calon pemimpin, namun ada kader Muhammadiyah juga ada yang mengikuti kontestasi pemilu dengan tujuan untuk menegakan agama ajaran Islam dengan cara politik. Adapun pada prakteknya setiap warga Muhammadiyah yang menjadi wakil legislative harus ada sumbangsih terhadap masyarakat umum. Sedangkan khususnya pada perserikatan Muhammadiyah”.¹³⁸

¹³⁷ Hasil Wawancara Bapak Faris Selaku Tokoh Nahdlatul Ulama Bumiayu Pada Tanggal 24 Februari 2024 Pukul 10:00 WIB.

¹³⁸ Hasil Wawancara Bapak Sukmono Selaku Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Bumiayu, Pada Tanggal 27 Februari Pukul 11:30. WIB.

Artinya kedua ormas tersebut berpendapat bahwasanya tidak menuntut warganya untuk memilih calon tertentu dan membebaskan pilihannya. Adapun dalam prakteknya beberapa warga NU maupun Muhammadiyah memilih pemimpin berlandaskan ikatan yang sama pada setiap individu. Menurut NU dan Muhammadiyah politik itu salah satu cara yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun pada prakteknya terkait pernyataan di atas baik dari pihak NU maupun Muhammadiyah juga mempunyai target tertentu dalam agenda politiknya yakni mensejahterakan warga pada umumnya sedangkan khususnya warga yang mempunyai ikatan yang sama yakni seperti memajukan organisasinya melalui cara politik.

Sedangkan dari pimpinan Muhammadiyah dan NU Kecamatan Bumiayu dalam pemilihan umum tahun 2024 ini keduanya menyatakan bersikap netral tidak memihak siapapun dari ketiga calon yang ada.

Kaitannya dengan dampak politik identitas bagi Masyarakat Sipil NU dan Muhammadiyah berpendapat dari kalangan NU melalui Gus Mudrik mengatakan:

“Menurutnya apabila caleg dari warga NU jika di lihat dari identitasnya dari sudut pandang diluar warga NU atau orang awam mungkin tidak terlalu berdampak. Namun jika dari kacamata warga Nahdliyin tersendiri apabila pemimpin dari NU. Mungkin menguntungkan bagi organisasi tersebut. Karena akan memprioritaskan sesama warga NU itu tersendiri. Baik yang akademis maupun warga biasa. Karena kita tidak memungkiri adanya money politik yang ada dilapangan. Mengakibatkan suatu keberpihakan”.¹³⁹

¹³⁹ Hasil Wawancara Gus Mudrik Selaku Ketua Ansor Cabang Bumiayu Pada Tanggal 26 Februari 2024 Pukul 15:00. WIB.

Sedangkan menurut pendapat dari Muhammadiyah melalui Bapak Faqih mengatakan:

“Dampak positifnya mungkin ada kesamaan identitas atau perasaan senasib menjadikan rasa solidaritas tinggi. Sedangkan negatifnya menjadikan orang berketergantungan terhadap apa yang diinginkan harus sama dengan identitasnya baik dari bidang agama, budaya dan ekonomi yang sama. Apa bila identitas dikemukakan dengan membabibuta maka kita tidak akan mandiri apabila dijelaskan dengan baik maka akan membuat kita lebih mandiri”.¹⁴⁰

Melalui pernyataan diatas tersebut NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwasanya baik masyarakat sipil atau masyarakat yang akademispun bisa terkena dampak dari praktik politik identitas baik secara positif maupun negatif. Karena politik identitas mengakibatkan adanya suatu keuntungan dari pihak tertentu namun ada juga kerugian terhadap pihak yang lainnya. Maka dari itu politik identitas selalu menjadi hal yang dianggap tidak sepenuhnya baik.

Jadi pada intinya kedua ormas Islam tersebut bersikap netral ketika dalam pemilu dan tidak ikut dalam politik praktis. Dari NU sendiri keterlibatan tokoh NU murni karena perjuangan bukan karena uang ataupun yang lainnya karena NU menerapkan prinsip politik kebangsaan dan kerakyatan, yaitu yang dibela adalah kepentingan dari masyarakatnya bukan karena perseorangan.

Menanggapi praktik politik identitas selalu terkait dengan kelompok tertentu. Kelompok itu berbasis ras, etnis, agama, suku, sosial, ekonomi gender dan jenis pengelompokan lain seperti organisasi masyarakat

¹⁴⁰ Hasil Wawancara Pak Faqih selaku tokoh Muhammadiyah Bumiayu, Pada Tanggal 28 Februari 2024 Pukul 09:00. WIB.

layaknya NU dan Muhammadiyah. Peran NU dan Muhammadiyah dalam bidang politik yang ada di Indonesia sangat besar dari pemilu yang pertama pada tahun 1955 sampai sekarang. Tidak terpujungi NU dan Muhammadiyah juga sempat tergabung dalam satu partai politik yakni Masyumi yang ikut andil dalam politik praktis ketika itu. Dalam pemilu khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 terdapat perbedaan pandangan dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan sesuatu hal yang wajar.

Dari kalangan Muhammadiyah melalui ketua PCM Kecamatan Bumiayu Bapak Sukmono mengatakan bahwa, menurut pandangan Muhammadiyah mengenai praktik politik identitas yang ada di Bumiayu yakni apabila ada pengurus Muhammadiyah yang masih menjabat atau masih aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah dan ingin mencalonkan sebagai wakil rakyat maka harus berhenti sementara sebagai pengurus. Karena sesuai dengan ketentuan dari aturan pimpinan Muhammadiyah. Sedangkan NU juga seperti itu yang ikut serta berperan aktif dalam politik praktis adalah warga Nahdliyin yang sedang tidak menjabat kepengurusan atau aktif dalam organisasi. Karena jika hal ini tidak diberlakukan maka akan terjadinya praktik politik identitas yang mengatasnamakan organisasi tersendiri dan merugikan kepentingan masyarakat secara umum.

Apabila adanya tuntutan dalam organisasi yang mengajak masyarakatnya untuk memilih apa yang dia pilih dianggap tidak lazim dan tidak semestinya NU dan Muhammadiyah seperti itu. Karena NU dan Muhammadiyah sepakat bahwasanya tujuan dari politik adalah untuk

menata atau mencari solusi dari permasalahan yang ada seperti masalah ekonomi, sosial, agama atau masalah lainnya. Karena suatu permasalahan yang paling besar yang ada di Indonesia dengan isu politik yakni masalah yang berkaitan dengan SARA.

Dari pemaparan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa politik identitas adalah politik yang menguntungkan beberapa golongan tertentu namun merugikan banyak golongan. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah setuju bahwa praktik politik identitas tidak efektif. Identitas kelompok dapat membuat mereka terpecah. Ini juga dapat membagi dunia sosial menjadi dua bagian yang saling berlawanan baik di dalam dan di luar hubungan kelompok. Dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan agama.

C. Persamaan dan perbedaan pandangan NU dan Muhammadiyah Bumiayu terhadap politik identitas

Secara umum diketahui bahwa Islam Indonesia lebih banyak mengikuti tradisi Sunni daripada Syi'ah. Salah satu sebab munculnya tradisi Sunni (*ahlussunnah wal jamaah*) ini ialah adanya upaya rekonsiliasi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik akibat perang saudara yang terjadi pada awal sejarah Islam.¹⁴¹ Karena itu, jika ditelusuri akar teologisnya, *Ahlussunnah wal Jamaah* ini pada hakikatnya merupakan aliran tengah dari dua kutub besar aqidah jabariyyah yang fatalistik dan *qadariyyah* yang meletakkan manusia sebagai subjek yang berkuasa penuh atas perjalanan hidupnya. Konflik yang berlarut-larut akibat masih kentalnya semangat

¹⁴¹ Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 28.

kesukuan ketika masa khalifah Utsman dan Ali, akhirnya bisa reda ketika munculnya supremasi kekuasaan Mu'awiyah. Ke kuasaan Mu'awiyah sedikit banyak telah berhasil meredam konflik, meskipun harus tersedia semacam konsesi yang diperlukan untuk menampung kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam melalui proses rekonsiliasi politik. Itulah sebabnya tahun itu dikenal dengan "tahun rekonsiliasi" yang akhirnya berkembang menjadi *Ahlussunnah wal Jamaah*.

Paham *ahlussunnah wal jamaah* yang di Indonesia seolah-olah hanya menjadi identitas NU ini," bagi NU sendiri memang tidak terbatas hanya pada bidang fikih. Secara teologis NU juga menganut mazhab Asy'ariyyah dan Maturidiyyah yang di kenal pula sebagai pengikut mazhab *ahlussunnah wal jamaah*. Mazhab kalam Asy'ari merupakan jalan tengah antara rasionalisme Mu'tazilah dan fatalisme Jabariyyah dengan pendekatan yang menggabungkan aspek akal dan naql atau antara rasionalisme kontekstual dengan doktrin tekstual. Pendekatan "tengah" yang dikembangkan Asy'ari ini dalam memandang perbedaan-perbedaan cenderung lebih moderat.¹⁴² Dalam persoalan perbuatan manusia, misalnya, aliran Mu'tazilah memandang bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri, sehingga ia dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Sebaliknya aliran Jabariyyah justru memandang manusia sebagai makhluk pasif. Ia tidak menciptakan perbuatannya dan Tuhanlah yang menciptakan segala perbuatan manusia.

¹⁴² Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 29

Aliran Asy'ari di sisi lain, mencoba menggabungkan pemikiran dari dua aliran di atas. Menurutnya ada dua unsur yang terlibat dalam perbuatan manusia yaitu unsur kekuasaan tuhan dan unsur ikhtiar manusia sendiri. Unsur yang bersumber dari tuhan berupa qudrah, sedangkan unsur yang bersumber dari manusia sendiri berupa kasb. Artinya manusia tidak memiliki kekuasaan mutlak sendiri untuk bebas berbuat apa saja, dan pada saat yang sama, Tuhan juga ikut terlibat dalam menentukan perbuatan manusia sambil tetap memberikan peluang berkehendak kepada manusia melalui fasilitas akal yang diberikannya. Namun demikian dalam perkembangan selanjutnya Asy'ari sendiri mengalami kesulitan merumuskan konsep tersebut sehingga banyak ulama yang beranggapan konsep itu masih bersifat jabariyyah juga, karena pada dasarnya penciptaan manusia terhadap perbuatannya sendiri tidak efektif.¹⁴³

Sedangkan Muhammadiyah memandang politik dari dua sisi yang saling terkait. *Pertama*, politik diposisikan sebagai bagian integral ajaran Islam. Politik dalam kehidupan berbangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian. Yang dijiwai dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral atau etika. *Kedua*, politik berfungsi sebagai instrumen meraih cita-citanya yaitu masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara baik melalui perjuangan politik (struktural) maupun melalui pengembangan masyarakat (kultural) pada dasarnya merupakan instrumen untuk membangun suatu kehidupan di mana nilai-nilai *Ilahiah* (ke-Tuhanan)

¹⁴³ Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 29.

tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan untuk terwujudnya "*Baladun Thay yibatun wa Rabbun Ghafur*," suatu negara yang indah, bersih, sud dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun.¹⁴⁴

Ahmad Dahlan menawarkan pemikiran dan sikap *ijtihad* dan *ittiba*, bukan *taklid*. Seperti penilaian Nurcholish Madjid, Ahmad Dahlan kendati tidak berlatar belakang pendidikan Barat, namun membuka pintu lebar-lebar gerbong rasionalisme melalui ajaran Islam itu sendiri. Tokoh ini membuka *ijtihad* lebar-lebar serta membuang jauh-jauh *taklid* dari kehidupan umat. Dahlan bahkan sebagai penyambung matarantai intelektualisme Islam di Indonesia. Corak pembaruan Dahlan di samping purifikasi atau pemurnian ajaran teologi dan ritual juga dinamisasi ajaran kemanusiaan dan kebangsaan termasuk aspek politik, terutama yang disebut terakhir dan tidak berkembang, karena tuntutan sosiologis lebih mengedepankan pada pemecahan masalah sosial secara kongkret dan perangkat keras untuk menyosialisasi gagasan-gagasan seperti perguruan tinggi dan media masa belum ada. Hal ini tidak dijumpai pada diri Muhammad Abduh pembaru Islam dari Mesir yang gagasan-gagasan pembaruannya didukung oleh institusi perguruan tinggi *Al-Azhar* dan *Dar Al-Ulum* serta majalah *Al-Urawatul Wustqa*.¹⁴⁵

Pemikiran Ahmad Dahlan sangat pragmatis dikenal sebagai tokoh yang sangat sederhana, ia seperti sosok pembaharu baik dalam purifikas

¹⁴⁴ Syaifulloh, *Pergeseran Politik Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 62.

¹⁴⁵ Syaifulloh, *Pergeseran Politik Muhammadiyah...*, hlm. 66.

teologi dan ritual sekaligus dinamisasi amal kemanusiaan. Ahmad Dahlan telah membangun akar-akar pembaruan pemikiran di kawasan politik. Kiprahnya sebagai anggota dan penasihat partai Budi Utomo dan partai Syarikat Islam adalah indikasi kuatnya Ahmad Dahlan tidak menegaskan politik. Kongres Budi Utomo pada tahun 1917 yang difasilitasi Ahmad Dahlan, memunculkan perbedaan asas Islam dalam anggaran dasarnya yang semula netral dalam agama tanpa mengabaikan kebebasan beragama. Patut diduga gagasan pro Islam tersebut mengindikasikan pengaruh pembaruan pemikiran politik Islam dari Ahmad Dahlan yang telah berhubungan secara intelektual dan politik dengan Budi Utomo sejak tahun 1909.¹⁴⁶

Kesejatian islam oleh Ahmad Dahlan digambarkan dengan empat pilar yaitu: *pertama*, rukun iman atau teologi Islam. *Kedua*, rukun Islam (syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji). *Ketiga*, etika, dan *keempat*, relasi kemanusiaan meliputi amar ma'ruf (*humanisasi*) nahi munkar (*liberasi*) dan *mu'awanah* atau tolong menolong (*advokasi*). Persatuan dunia Islam menjadi obsesi Ahmad Dahlan dan harus diwujudkan dalam satu institusi. Lebih dari itu, misinya tidak lain adalah menebarkan kedamaian dan keselamatan dunia. Ahmad Dahlan mengatakan, Persatuan Islam itulah yang harus kita tuju. Semua orang Islam harus menjadi badan satu yang berguna Tanda hidupnya itu bergerak dan tidak diam saja. Gerak orang Islam harus menuju satu yakni selamatnya dunia.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Syaifullah, *Pergeseran Politik Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 66-67.

¹⁴⁷ Syaifullah, *Pergeseran Politik Muhammadiyah....*, hlm. 68.

Misi kedamaian dan keselamatan dunia menjadi tanggung jawab anak manusia, karena itu harus dibicarakan bersama-sama. Sungguh pun para pelakunya harus melintasi sekat-sekat batas agama. Ahmad Dahlan mengatakan semua keperluan bersama-sama harus dibicarakan bersama-sama. Perhubungan antara orang Islam dengan siapa juga tiada dilarang untuk keperluan hidup segala manusia.¹⁴⁸ NU dan Muhammadiyah sekapat bahwa politik adalah sebuah salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat baik di dunia maupun di akherat kelak. Seperti halnya di Bumiayu merujuk dari sudut pandang identitas seperti identitas Agama, Ekonomi, Budaya dan Generasi antara lain:

Dalam sudut pandang agama. Karena agama dapat memperkuat identitas seseorang dengan mengajarkan mereka untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan nilai-nilai dan keyakinan mereka. Dalam hal politik agama juga dapat digunakan untuk memilih pemimpin. Dalam hal ini agama sebagai konteks spiritual membantu orang memeriksa masalah yang terjadi selama perkembangan identitas Indonesia khususnya di Bumiayu. Karena di bumiayu untuk beberapa kalangan seperti halnya masyarakat NU dan Muhammadiyah apabila memilih pemimpin harus berdasarkan dengan ilmu agama yang mumpuni dan karakter yang baik.¹⁴⁹

Dalam sudut pandang ekonomi. Kemajuan ekonomi dan peristiwa sehari-hari menciptakan dinamika yang sangat kompleks. Seringkali logika ekonomi tidak cukup untuk memahami atau menganalisis peristiwa

¹⁴⁸ Syaifulloh, *Pergeseran Politik Muhammadiyah*, hlm. 68.

¹⁴⁹ Rizkita Imanina dan M. Akhyar “ Gambaran Pembentukan Identitas Agama Pada *Religious Disbeliver* Usia *emerging Adult* ”, *Jurnal Mindset*, Vol. 9. No.1, 2018, hlm. 22

fenomena atau perkembangan ekonomi. Selain itu para ekonom dan analisis tidak dapat meramalkan krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia.¹⁵⁰ Di Indonesia kebutuhan pokok utama adalah makanan dengan kebutuhan utamanya adalah beras. Hal inilah Seringkali dimanfaatkan para caleg memberikan sumbangan berupa beras pada masyarakat bertujuan untuk mendapatkan suara. Dengan iming-iming sodaqoh.¹⁵¹

Dalam sudut pandang suku. Banyaknya suku yang ada di Indonesia dan memiliki tradisi yang sangat berbeda. Seperti di Bumiayu karena Bumiayu merupakan daerah yang kecil. Penduduknyapun tidak terlalu beragam. Di Bumiayu hanya ada suku jawa dan sunda selebihnya dari suku lain atau masyarakat pendatang. Dalam pemilihan umum yang terjadi pada tahun ini banyaknya masyarakat Bumiayu memilih calon pemimpin mereka berdasarkan ikatan batin seperti dari suku yang sama maka akan menguntungkan bagi kelompok mereka.¹⁵²

Dalam sudut pandang generasi. 57% pemilih muda atau generasi Z dan milenial yang sudah memilih di Pemilu 2024. Dengan jumlah setengah lebih dari total pemilih, penilaian preferensi politik anak muda akan berdampak pada dinamika politik selama pemilu. Ini terkait dengan setidaknya dua hal. Pertama, persepsi dan preferensi anak muda terhadap politik dianggap penting untuk mengukur tingkat partisipasi politik anak muda. Kedua, persepsi dan preferensi anak muda terhadap aktor politik dianggap berdampak pada strategi kampanye yang digunakan aktor politik

¹⁵⁰ Hudyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.

¹⁵¹ Hudyanto, *Ekonomi Politik...*, hlm. 46.

¹⁵² Umam, "Pengertian Suku Bangsa Pembentukan Konsep dan Ciri-ciri", <https://www.gramedia.com>. diakses 10 Februari 2024.

selama pemilu. Seperti halnya di Bumiayu Generasi Muda lebih dominan pada pagelaran pemilu tahun ini contohnya seperti anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) kebanyakan anak muda atau gen z dan milenial. Artinya pemilu tahun ini sangat dipengaruhi oleh generasi muda tidak seperti tahun sebelum-sebelumnya.¹⁵³

Dalam sudut pandang sosial. Perilaku manusia dalam konteks sosial selalu terkait dengan orang lain karena semua orang hidup dalam masyarakat. Hal-hal di luar perilaku manusia, seperti keinginan untuk mendapat respons dari orang lain, dan tunduk pada aturan atau norma masyarakat, mempengaruhi perilaku manusia. Seperti halnya pada masyarakat Bumiayu masih adanya kelas sosial tertentu yang tidak bisa berkolaborasi dengan masyarakat biasa hal ini yang bisa mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan suatu masyarakat karena perbedaaan kelas sosial yang berkaitan dalam kontestasi pemilihan umum yang terjadi pada tahun ini. Masih adanya masyarakat kelas menengah kebawah yang tertipu dan menerima bantuan sosial padahal untuk kepentingan politik.¹⁵⁴

Menurut pandangan masyarakat sipil demokrasi memastikan bahwa semua orang sama. Masyarakat sipil muncul sebagai hasil dari modernitas. Masyarakat sipil memaknai politik berlandaskan ilmu logika seperti masyarakat barat. Masyarakat ini dianggap sebagai gerakan masyarakat sekuler yang menjauh dari tuhan berbeda dengan masyarakat madani berasal dari negara-negara Arab yang penuh dengan elemen agama. Seperti

¹⁵³ Yolency, "Peran Penting Gen Z dan Milenial Menuju Tantangan Politik Baru Pada Pemilu 2024", *www.tubankab.go.id*. Di akses 10 Februari 2024.

¹⁵⁴ Elly M Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 63.

NU dan Muhamadiyah menganggap permasalahan di dunia diselesaikan harus dengan sumber yang mengacu kepada hukum islam yang berlandaskan Al-qur'an dan hadis.¹⁵⁵

Menurut Muhamadiyah politik berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuannya, yaitu masyarakat Islam yang sebenarnya. Usaha-usaha untuk membangun kehidupan bangsa dan negara, baik melalui perjuangan politik (struktural) maupun pengembangan masyarakat (kultural), pada dasarnya merupakan instrumen untuk membangun suatu kehidupan baik Makmur atau sejahtera baik di dunia maupun akhirat kelak.¹⁵⁶

Sedangkan menurut pandangan NU polarisasi dalam persaingan politik yang mengarah pada politik identitas dapat merugikan kepentingan umum. Seperti isu-isu yang menyangkut SARA. Adapun NU berpolitik dengan tujuan untuk memperkuat pendidikan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. NU mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi asas bangsa Indonesia dan tentu berlandaskan hukum Islam.¹⁵⁷

Sebuah kesepakatan dibuat antara para pemimpin Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah untuk membentuk lembaga yang akan melindungi dan menjaga kepentingan umat Islam. Ini disebut Majelis Islam A'laa Indonesia.

¹⁵⁵ Monica Ayu Caesar “Perbedaan Civil Society dan Masyarakat Madani”, <https://nasional.kompas.com>. Diakses 14 Februari 2024.

¹⁵⁶ Syaifullah, *Pergeseran Politik Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 62.

¹⁵⁷ Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LP3ES, 2004), hlm. 1.

Pada tahun 1939 yang bergerak pada bidang sosial agama yang bertujuan untuk menyatukan umat islam untuk melawan penjajah¹⁵⁸

Manusia dianggap sebagai makhluk sosial. karena manusia tidak dapat hidup sendiri seperti organisasipun harus saling membantu dalam kebaikan layaknya NU dan Muhammadiyah. karena mereka memerlukan bantuan dari orang lain. Manusia memiliki akal untuk bertahan hidup, berbeda dengan hewan hanya memiliki insting atau naluri. Manusia harus bisa saling bantu membantu demi kesejahteraan bersama dalam kehidupan¹⁵⁹

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat bahwasanya praktik politik identitas itu tidak baik seperti yang di singgung dari uraian diatas dari berbagai factor identitas. Identitas kelompok dapat memecah belah kelompok. Ini juga dapat membagi dunia sosial menjadi dua bagian yang saling berlawanan dalam hubungan dalam kelompok atau di luar kelompok. Baik dalam berbagai factor suku ekonomi sosial maupun agama.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Kholid Mawardi dan Imam Hidayat, *Relasi Sosial Politik Nadlatul Ulama Pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942*, (Banyumas: Rizquna, 2023). hlm. 88.

¹⁵⁹ Elly M Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 64

¹⁶⁰ Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah di yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Praktik politik identitas pada Masyarakat Sipil dalam kontestasi pemilihan umum 2024 maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Praktek Politik Identitas terhadap masyarakat sipil di Bumiayu adalah sesuatu fenomena yang baru. Sebab, semua politik melibatkan unsur identitas. Politik identitas menunjukkan orientasi politik yang dibangun di sekitar identitas sosial (yang sudah ada sebelumnya). Menurut pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Bumiayu yang terjadi khususnya di Bumiayu ialah politik dengan identitas agama dan ekonomi karena adanya money politik. Ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa apabila memilih pemimpin harus berlatarbelakang yang sama dengannya baik agama yang dianut atau organisasi yang ia pilih. Adapun secara sederhana, politik identitas dapat dipahami sebagai aktivitas politik yang berbasis identitas atau menggunakan identitas dalam keterlibatan politik, atau sebaliknya memperjuangkan kepentingan dan kebaikan identitas melalui sarana politik dalam berbagi cara seperti agama, budaya, ekonomi maupun sosial.

Adapun perbedaan serta persamaan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Bumiayu terhadap pengambilan hukum praktik politik identitas mengikuti pendapat dari PBNU dan PP Muhammadiyah terhadap masyarakat sipil ialah:

Nahdlatul Ulama didirikan untuk melestarikan, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlusunnah Wal Jama'ah*, yang menganut salah satu dari empat madzhab, menyatukan langkah para ulama dan pengikutnya dan melakukan tindakan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Adapun ada beberapa cara termasuk dengan politik, karena politik merupakan instrument yang mengelola dan menyejahterakan rakyat. Menurut KH. Abudrrahman Wahid (Gus Dur) mengingtkan bahwasanya yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan, bukan untuk memperebutkan kekuasaan dan NU berpolitik dengan cara islam yaitu yang mengacu pada Al-Qur'an, Hadist atau Sunnah, Ijma dan Qiyas.

Sedangkan Muhammadiyah memandang politik dari dua sisi yang saling terkait. *Pertama*, politik diposisikan sebagai bagian integral ajaran islam. Politik dalam kehidupan berbangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian. Yang dijiwai dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral atau etika. *Kedua*, politik berfungsi sebaga instrumen meraih cita-citanya, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun pola ijtihadnya adalah Muhammadiyah sangat normative berpegangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Seperti sifat-sifat Rosul yakni siddiqh, amanah, fatonah dan tabligh dalam hal yang berkaitan dengan kepimipinan.

Perbedaan pengambilan sumber hukum terkait praktik politik identitas Nahdlatul Ulama dan Muhmmadiyah. Nahdlatul Ulama menggunakan al-qur'an, hadis, ijma qiyas. sedangkan Muhammadiyah menggunakan al-

Qur'an dan hadis. Persamaan pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat bahwasanya praktik politik identitas itu tidak baik karena akan menimbulkan kegaduhan atau perpecahan sesama masyarakat secara umum, khususnya di Bumiayu.

B. Saran

1. Praktik Politik Identitas merupakan hal yang membahayakan bagi masyarakat Indonesia oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bahaya politik identitas dan memperjuangkan solusi yang inklusif dan menyeluruh.
2. Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah harus ikut andil dalam pendidikan politik agar mengetahui dampak dari politik identitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Afthonul. *Teori Identitas Sosial*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Alfansyur, Andarusni dan ariyani. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”. Universitas Sriwijaya: *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol.V. No.2. 2020.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Anonim. “NU dan Muhammadiyah Berbeda dalam Satu”. www.pinterpolitik.com, diakses 5 Desember 2023.
- Ansori, Isa. Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih Di Indonesia. *Jurnal Nizam*, Vol IV, No. 01, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Asha, Habib Kurniawan. “Muhammadiyah dan Politik”, <https://muhammadiyahponorogo.or.id>. diakses 14 Februari 2024.
- Ayu Caesar, Monica. “Perbedaan Civil Society dan Masyarakat Madani”. <https://nasional.kompas.com>. Diakses 14 Februari 2024.
- Bairahmat. “Elite Penentu Dalam Politik Lokal”. *Jurnal Jom Fisip*, Vol. IV, No. 2, 2014.
- Chaedar, A Alwaasilah. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Dunia Pustaka Jaya. 2017.
- Cnn Indonesia “Sejarah Singkat Orde Baru Latar Belakang dan Penyebab Jatuhnya”. <https://cnnindonesia.com>. diakses 15 Februari 2024.
- Dafan Inanda, Muhammad. “Pengaruh Ulama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.
- Damarastuti, Rini. *Mindfulness dalam Komunikasi Antarbudaya Pada Kehidupan Masyarakat Samin dan Masyarakat Rote Ndao NTT*. Yogyakarta: Buku Litera. 2013.
- Damarastuti, Rini. *Mindfulness dalam Komunikasi Antarbudaya Pada Kehidupan Masyarakat Samin dan Masyarakat Rote Ndao NTT*. Yogyakarta: Buku Litera. 2013.

Dinas Kominfo Statistik dan Persandian. “Peran Penting Ulama dalam Memperkokoh Moral dan Pemilu Jujur”. <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id>. Diakses 5 Desember 2023.

Electoral Governance. “Tata kelola Pemilu Indonesia Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas Dalam Pemilu”. <https://journal.kpu.go.id>. diakses 5 Desember. 2023.

Fadeli, Soeleiman. *Analogi NU Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*. Surabaya: Khalista, 2010.

Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sipil Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.

Hadi, Otho H. “Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokrasi”. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. XIV. No 2. 2010

Handaya Wicaksana, Prasetya, Keterlibatan Kaum Awam Katolik Dalam Bidang Politik, (Studi Kasus di Desa Banjarsari Pada Tahun 2012-2013)”, *Jurnal Politik*, Vol.III. No.2. 2014.

Hasil Wawancara Bapak Faqih selaku tokoh Muhammadiyah Bumiayu, Pada Tanggal 28 Februari 2024 Pukul 09:00. WIB.

Hasil Wawancara Bapak Faris selaku Tokoh Nahdlatul Ulama Bumiayu Pada Tanggal 24 Februari 2024 Pukul 10:00 WIB.

Hasil Wawancara Bapak Sukmono selaku Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Bumiayu, Pada Tanggal 27 Februari Pukul 11:30. WIB.

Hasil Wawancara Gus Mudrik selaku Ketua Ansor Cabang Bumiayu Pada Tanggal 26 Februari 2024 Pukul 15:00. WIB.

Hasil Wawancara Ibu Hamidah selaku Ketua Fatayat Bumiayu, Pada Tanggal 1 Maret 2024 Pukul 14:00. WIB.

Hasil Wawancara Ibu Siti Khasanah selaku Ketua Aisiyah Cabang Bumiayu, Pada Tanggal 4 Maret 2024 Pukul 16:00 WIB.

Hudiyanto. *Ekonomi Politik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.

Imanina, Rizkita dan M. Akhyar. “Gambaran Pembentukan Identitas Agama Pada *Religious Disbeliever* Usia *emerging Adult*”. *Jurnal Mindset*, Vol. IX. No.1. 2018.

Jahidin, Asep. “Pertarungan Ulama di pilpres 2019”. www.m.detik.com. Diakses 6 Desember 2023.

M Setiadi, Elly dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana. 2006.

- M Setiadi, Elly dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana. 2006.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia. 2017.
- Mahfudz, Sahal dkk. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista. 2011.
- Mawardi, Kholid dan Imam Hidayat. *Relasi Sosial Politik Nadlatul Ulama Pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942*. Banyumas: Rizquna. 2023.
- Mawardi, Kholid dan Imam Hidayat. *Relasi Sosial Politik Nadlatul Ulama Pada Masa Penjajahan Belanda Tahun 1926-1942*. Banyumas: Rizquna. 2023.
- Muhtar. “Menenal 6 Macam Generasi di Indonesia Sesuai Tahun Lahir, Kamu Termasuk Yang Mana”. <https://uici.ac.id>. Diakses 10 Februari 2024.
- Munawaroh, Nafiatul “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia” <https://hukumonline.com>. diakses 14 April 2023.
- Muntoha, Akbar Gufron dkk. “Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Tes Kemampuan Literasi Numerasi Berdasarkan Newman’s Analysis Error”. www.unisula.ac.id. Diakses 06 Maret 2022.
- Nabila Qonita, Fathia. “PBNU dan Muhammadiyah Tolak Politik Identitas, Dorong Politik Rasional”. News.detik.com, diakses 9 Desember 2023.
- Nada, Nibras. “Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia”, www.kompas.com. diakses 11 Februari 2024.
- Nasirudin, Juhana. “Politik Identitas dan Reprsentetasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2018-2022)”. *Jurnal*, Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung 2022.
- Nurhayati, dkk. *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Orgnisasi dan Sistem Nilai*. Yogyakarta: Trust Media. 2018.

- Oktaviano. "Update Real Count Pileg 2024, Suara PDIP di Jateng Turun Tipis dibandingkan 2019". <https://m.harianjogja.com>. Diakses 2 Maret. 2024.
- Oktaviano. "Update Real Count Pileg 2024, Suara PDIP di Jateng Turun Tipis dibandingkan 2019". <https://m.harianjogja.com>. Diakses 2 Maret 2024.
- Pasha, Shalahudin dkk. "Upaya Mengatasi Krisis Identitas Nasional Generasi Z Di masa Pandemi". *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. V. No 2. 2021.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodelogi Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Saeful, Asep. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*. Jakarta: LP3ES. 2004.
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media. 2019.
- Santoso, Budi. "Bahasa dan Identitas Budaya". *Jurnal Sabda*. Vol. I. No.1 2006.
- Sodikin. *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing. 2014.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sugiyono. "Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel dengan Ciri Khusus dan wajib tahu". <https://www.merdeka.com>. diakses 20 Desember 2023.
- Suketi dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian hukum: Filsafat, Teori danPraktik*. Depok: Raja Grafindo. 2018.
- Suliansyah. "Menepis Hoax di Media Sosial ditahun Politik: Pendekatan Systematic Literature Review", *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol.VI. No.1. 2023.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1994

- Suryadi Bakry, Umar. *Multikulturalisme dan Politik Identitas*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2020.
- Susanti, Silmi. “Politik Identitas Di Kota Mataram (Studi Pemenangan Pasangan Ahyar Abduh-Mohan Roliskana Dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2015)”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Mataram. 2015.
- Suwarno dan Asep Daud. *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Suwarno dan Asep Daud. *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah di Banyumas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Syabanira, Tiara. “Mengenal Generasi Boomers, X, Y dan Alpha, Seperti apa Kepribadiannya”. <https://www.brainacademy.id>. diakses 10 Februari 2024.
- Syaifulloh. *Pergeseran Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Umam. “Pengertian Masyarakat Madani, Ciri-ciri Karakteristik dan Sejarahnya”, www.gramedia.com. Diakses 14 Februari. 2024
- Umam. “Pengertian Suku Bangsa: Pembentukan, Konsep dan Ciri-ciri”. <https://www.gramedia.com>. diakses 10 Februari 2024.
- Wahidmurni. “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif”. <https://repository.uinmalang.ac.id>. diakses 20 Desember 2023.
- Wayan, Ni Novi Budiasni. *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa)*. Bali: Nilacaraka. 2020.
- Wicaksana, Prasetya Handaya. “Keterlibatan Kaum Awam Katolik Dalam Bidang Politik, (Studi Kasus di Desa Banjarsari Pada Tahun 2012-2013)”. *Jurnal Politik*, Vol.III. No.2. 2014.
- Widiastuti, Rina. “Kiprah Muhammadiyah di Kancah Politik dari Masa ke Masa”. www.tempo.com. Diakses 15 Februari. 2024.

Widodo, Eko. “Pentingnya Identitas dalam Ekonomi”. <https://swa.co.id>. Diakses 20 Maret 2024.

Wikanto, Adi. “Ada Pelanggaran Etika Saat Pendaftaran, Apakah Penetapan Cawapres Gibran Batal” www.kontan.co.id. Diakses 12 Februari 2024.

Y Tohari, Hajriyanto. *Muhammadiyah dan Pergulatan Politik Islam Modernis*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah. 2005.

Yolency. “Peran Penting Gen Z dan Milenial Menuju Tantangan Politik Baru Pada Pemilu 2024”. www.tubankab.go.id. Di akses 10 Februari 2024.

Yunus, Lukman. “Peran Politik Identitas Etnis (studi kasus Pilkades Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat)”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makasar 2014.

Zaid Wahyudi, Muchamad. “ Karakter Pemilih Pemilu 2024”, <https://www.kompas.id>, diakses 2 Maret 2024.







LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN OBSERVASI, WAWANCARA DAN DOKUMENTASI
PENELITIAN PRAKTIK POLITIK IDENTITAS PADA MASYARAKAT
SIPIIL DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024

(Analisis Komparatif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
 Kecamatan Bumiayu)

Pedoman Observasi

1. Data-data Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Bumiayu
2. Mengamati Praktik Politik Identitas Pada masyarakat Sipil dalam kontestasi pemilu 2024 di Bumiayu.
3. Mengamati interaksi tokoh dan caleg serta respon Masyarakat

A. Pedoman Wawancara

Informan:

1. Tokoh Nahdlatul Ulama
 - a. Bagaimana praktik politik identitas di Bumiayu?
 - b. Bagaimana Sikap NU terhadap politik identitas?
 - c. Apa dampak positif politik identitas bagi masyarakat sipil?
 - d. Apa dampak negative politik identitas bagi masyarakat sipil?
 - e. Bagaimana pola ijtihad NU terhadap praktik politik identitas?
2. Tokoh Muhammadiyah
 - a. Bagaimana praktik politik identitas di Bumiayu?
 - b. Bagaimana Sikap NU terhadap politik identitas?
 - c. Apa dampak positif politik identitas bagi masyarakat sipil?
 - d. Apa dampak negative politik identitas bagi masyarakat sipil?
 - e. Bagaimana pola ijtihad NU terhadap praktik politik identitas?

No	Wawancara	Nahdlatul Ulama	Muhammadiyah
1.	Bagaimanna Praktik politik identitas di Bumiayu	sejak muktamar di Situbondo, Nahdlatul Ulama telah menetapkan untuk tidak menjadi partai politik praktis. Namun, beberapa warga NU telah berpartisipasi dalam politik, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Muhammadiyah antara politik dan agama tidak dapat dipisahkan karena politik menjadi salah satu alat dakwah tetapi tidak dicampur dengan organisasi atau persarikatan termasuk di Bumiayu

2.	Sikap NU dan Muhammadiyah Terhadap praktik politik identitas dalam pemilu	NU tidak memandang politik identitas sebagai upaya yang akan membelah umat	Muhammadiyah memandang politik identitas sebagai suatu yang akan menimbulkan perbedaan atau perpecahan antara manusia
3.	Apa dampak positif praktek politik identitas bagi masyarakat sipil	Dampaknya terhadap keberlangsungan organisasi di NU dapat menjadikan sebuah prioritas dalam hal apapun	Begitu juga dengan Muhammadiyah akan menguntungkan warganya apabila berkaitan dengan Lembaga Muhammadiyah
4.	Apa dampak negative praktek politik identitas bagi masyarakat sipil	Menjadikan renggangnya suatu hubungan social antara masyarakat	Menjadikan ketidak harmonisan dalam lingkungan masyarakat
5.	Bagaimana upaya NU dan Muhammadiyah dalam mengelola politik identitas di masyarakat	NU beranggapan bawahsanya politik identitas tidak benar, akantetapi politik bisa berdampak positif apabila dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	setiap warga Muhammadiyah yang menjadi wakil legislative harus ada sumbangsih terhadap perserikatan Muhammadiyah maupun masyarakat umum
6.	Bgaimana pola ijtihad NU dan Muhammadiyah tentang praktik politik identitas?	NU mengikuti ideologi <i>Ahlusunnah wal jama'ah</i> selain bersumber dari Al-qur'an dan hadis ada juga Ijma dan qiyas. Karena ijma hasil kesepakatan dari Ulama	berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau Sunnah Nabi dan apabila di kedua sumber tersebut tidak ada penjelasan yang pasti maka bisa menggunakan Pintu Ijtihad

TRANSKIP WAWANCARA I

Narasumber : H. Ahmad Farisulhaq
Jabatan/posisi : Tokoh Nahdlatul Ulama Bumiayu
Hari/tanggal wawancara : Sabtu, 24 Februari 2024
Waktu wawancara : 09.30 – 10.00 WIB
Tempat wawancara : Di kediaman Pak Faris

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Sikap NU Terhadap praktik politik identitas dalam pemilu tahun 2024	Sebenarnya, ada politik identitas. Namun, sejak muktamar di Situbondo, Nahdlatul Ulama telah menetapkan untuk tidak menjadi partai politik praktis. Namun, beberapa warga NU telah berpartisipasi dalam politik, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebagian besar warga Nahdliyin memilih calon legislatif berdasarkan identitas mereka sebagai warga Nahdliyin. Sebagai contoh, karena PKB didirikan oleh Kader Nahdliyin, warga Nahdliyin lebih cenderung memilih partai tersebut karena ikatan yang mereka miliki satu sama lain.
2	Apa dampak positif dan negative praktek politik identitas bagi masyarakat sipil	Sebenarnya ada perbedaan karakter di antara anggota NU: beberapa menerima informasi dengan label benar dan memfilternya, sedangkan yang lain memfilter informasi yang benar dan Hoax. Karena fakta bahwa politik identitas memiliki dampak negatif terhadap kegiatan sosial di Bumiayu, pemilu tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.

3	Bgaimana pola ijtihad NU dan Muhammadiyah tentang praktik politik identitas?	Sumber ijtihad NU adalah Al-Qur'an, Hadist, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Namun, secara umum, NU mengacu pada perkataan Nabi Muhammad, yang berarti pemimpin harus sidiq, amanah, tabligh, dan fatonah.
---	--	--

TRANSKIP WAWANCARA II

Narasumber : Mudrik Al Maghribi

Jabatan/posisi : Ketua Ansor Nahdlatul Ulama Bumiayu

Hari/tanggal wawancara : Senin, 26 Februari 2024

Waktu wawancara : 14.30 – 15.00 WIB

Tempat wawancara : Di Kantor MWC NU Bumiayu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Sikap NU Terhadap praktik politik identitas dalam pemilu tahun 2024	Pada kontestasi pemilu tahun ini, ada praktik seperti calon legislatif dari PKB dari Fatayat NU. Karena beberapa partai berafiliasi dengan NU, ini menjadi daya tarik untuk menarik perhatian warga NU. meskipun tidak secara organisasi, namun kenyataan di lapangan berbeda. Sebagian besar warga NU percaya bahwa identitas sangat penting saat memilih caleg, jadi mereka harus tahu siapa caleg tersebut. Karena itu, ketika Nahdlatul Ulama masuk ke politik, mereka harus memiliki agenda untuk bangsa ini, seperti halnya ormas lain yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

2	Apa dampak positif dan negative praktek politik identitas bagi masyarakat sipil	Menurutnya, jika caleg dari warga NU dilihat dari identitasnya dari sudut pandang orang awam atau non-NU, itu mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan. Namun dari perspektif warga Nahdliyin, jika pemimpin berasal dari Nahdlatul Ulama. Mungkin bermanfaat bagi organisasi. Karena akan memberikan prioritas tertinggi kepada warga NU, ini unik. Baik akademisi maupun orang biasa. Karena kita tidak memungkiri bahwa ada uang politik di lapangan. menghasilkan empati.
3	Bgaimana pola ijtihad NU tentang praktik politik identitas	janji politik anggota NU, terutama di tingkat nasional dan daerah. Mereka mengikuti pendapat ulama atau kiyai, yang tetap menjadi referensi. karena warga NU percaya bahwa seorang ulama memiliki pemahaman tentang masalah apa pun. Ini termasuk berpolitik dengan benar. Karena tujuan politik organisasi keagamaan dianggap sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan umum

TRANSKIP WAWANCARA III

Narasumber : Hamidah Aisyahroni
 Jabatan/posisi : Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Bumiayu
 Hari/tanggal wawancara : Jum'at, 1 Maret 2024
 Waktu wawancara : 13.30 – 14.00 WIB
 Tempat wawancara : Di kediaman Ibu Hamaidah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Sikap NU Terhadap praktik politik identitas dalam pemilu tahun 2024	Tidak dapat disangkal bahwa identitas politik di Bumiayu selalu ada, bahkan sudah mendarah daging. Ini terlihat dalam bidang ekonomi, antara lain, di mana perempuan di Bumiayu menunjukkan loyalitas terhadap prinsip yang mereka pegangi. Karena

		mayoritas suara diberikan kepada perempuan dalam pemilihan umum ini
2	Apa dampak positif dan negative praktek politik identitas bagi masyarakat sipil	Menurutnya, jika caleg dari warga NU dilihat dari identitasnya dari sudut pandang orang awam atau non-NU, itu mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan. Namun dari perspektif warga Nahdliyin, jika pemimpin berasal dari Nahdlatul Ulama. Mungkin bermanfaat bagi organisasi. Karena akan memberikan prioritas tertinggi kepada warga NU, ini unik. Baik akademisi maupun orang biasa. Karena kita tidak memungkiri bahwa ada uang politik di lapangan. menghasilkan empati
3	Bgaimana pola ijtihad NU tentang praktik politik identitas	Ideologi Ahlusunnah wal Jama'ah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, serta Ijma dan Qias. Ijma adalah keputusan yang disepakati oleh ulama tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik, dan ulama berfungsi sebagai perantara dari sabda Nabi yang kemudian dianggap sebagai istinbath yang dapat diandalkan. Dalam hal politik, salah satunya

TRANSKIP WAWANCARA IV

Narasumber : H. Sukmono

Jabatan/posisi : Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Bumiayu

Hari/tanggal wawancara : Selasa, 27 Februari 2024

Waktu wawancara : 11.30 – 12.00 WIB

Tempat wawancara : Di Kantor Muhammadiyah Bumiayu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Sikap Muhammadiyah Terhadap praktik politik identitas dalam pemilu tahun 2024	Meskipun Muhammadiyah memberikan kebebasan warganya untuk memilih pemimpin, beberapa kadernya mengambil bagian dalam kontestasi pemilu untuk memaksakan ajaran Islam secara politik. Namun, setiap warga Muhammadiyah yang menjadi anggota legislatif harus bertanggung jawab kepada Muhammadiyah.

2	Apa dampak positif dan negative praktek politik identitas bagi masyarakat sipil	Karena mereka percaya bahwa seorang pemimpin harus memiliki keyakinan agama, ilmu pengetahuan, dan kejujuran, masyarakat sipil ini berbeda dengan masyarakat umum dalam hal berpikir. Akan lebih baik jika calon pemimpin memiliki keahlian ini untuk kepentingan umum. Adapun dampak lebih baik apabila calon pemimpin mempunyai kemampuan tersebut untuk kemashlahatan umat
3	Bgaimana pola ijtihad Muhammadiyah tentang praktik politik identitas	Muhammadiyah hadir di tengah-tengah Masyarakat dalam rangka untuk melaksanakan ajaran agama Islam murni berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist atau Sunnah Nabi dan apabila di kedua sumber tersebut tidak ada penjelasan yang pasti maka bisa menggunakan Pintu Ijtihad yakni masalah menyelesaikan suatu masalah, adapun perseikatan Muhammadiyah juga mempunyai suatu lembaga yaitu Majlis tarjih yang membahas terkait berbagai masalah salah satunya masalah politik

TRANSKIP WAWANCARA V

Narasumber : Faqih Maftuh
 Jabatan/posisi : Tokoh Muhammadiyah Bumiayu
 Hari/tanggal wawancara : Rabu, 28 Februari 2024
 Waktu wawancara : 09.00 – 09.30 WIB
 Tempat wawancara : Di SMA Muhammadiyah Bumiayu

No	Pertanyaa	Jawaban
1	Bagaimana Sikap Muhammadiyah Terhadap praktik politik identitas dalam pemilu tahun 2024	Secara umum, Muhammadiyah lebih toleran dan lebih terbuka daripada sebelumnya, karena agama dan politik tidak bisa dipisahkan, tetapi tidak dicampur dengan organisasi atau persarikatan, seperti di Bumiayu.
2	Apa dampak positif dan negative praktek politik identitas bagi masyarakat sipil	Kesamaan identitas atau perasaan senasib dapat menyebabkan rasa solidaritas tinggi. Namun, sisi negatifnya adalah membuat orang tergantung pada apa yang

		diinginkan harus sesuai dengan identitas agama, budaya, dan ekonomi mereka. Jika identitas ditunjukkan dengan membabibuta, kita tidak akan mandiri, tetapi jika identitas dijelaskan dengan benar, itu akan membuat kita lebih mandiri.
3	Bagaimana pola ijtihad Muhammadiyah tentang praktik politik identitas	Muhammadiyah berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis, serta sifat-sifat Rosul seperti Sidiqh, Amanah, Fatonah, dan Tabligh dalam hal kepemimpinan. Beberapa rujukan Muhammadiyah termasuk karya ulama terdahulu seperti Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan banyak lainnya yang merujuk pada rasul atau khulafaur rasydin, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

TRANSKRIP WAWANCARA VI

Narasumber : Siti Khasanah
 Jabatan/posisi : Ketua Aisiyah Muhammadiyah Bumiayu
 Hari/tanggal wawancara : Senin, 4 Maret 2024
 Waktu wawancara : 16.30 – 17.00 WIB
 Tempat wawancara : Di Klinik Pratama Aisiyah Bumiayu

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Sikap Muhammadiyah Terhadap praktik politik identitas dalam pemilu tahun 2024	Aisiyah Bumiayu berusaha untuk menjadi perempuan yang mandiri dan menjadi contoh atau suri tauladan. Aisiyah tidak ingin menjadi kaum yang lemah yang bergantung pada kaum lelaki dalam hal ekonomi atau pendidikan agar tidak terkontaminasi atau terpengaruh oleh politik yang salah.
2	Apa dampak positif dan negative praktek politik identitas bagi masyarakat sipil	Untuk saat ini, tidak ada perbedaan gender di jabatan pemimpin atau kepala di Bumiayu, baik di bidang politik, ekonomi, atau pendidikan. Masyarakat Muhammadiyah lebih memahami dan tidak

	khususnya bagi kaum perempuan	mudah terprovokasi oleh hal ini. Namun, beberapa orang mengabaikan masalah politik yang menyebabkan berita palsu.
3	Bagaimana pola ijtihad Muhammadiyah tentang praktik politik identitas	Muhammadiyah sering menggunakan penelitian mendalam tentang materi. Muhammadiyah mengikuti panduan dari tokoh-tokoh terkenal di berbagai bidang untuk mengajar. Ini terlihat dalam Amal Usaha Muhammadiyah, yang diterapkan di segala bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya. yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis dan berasal dari ulama yang kompeten





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 577/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : M. Ishlahul Azman
NIM : 1717304030
Semester/Prodi : 14/Perbandingan Mazhab

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Senin, 25 Maret 2024** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **68 (B-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 26 Maret 2024

An. Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-1061/Un.19/K.Pus/PP.08.1/1/2024

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : M. ISHLAHUL AZMAN
NIM : 1717304030
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyumbangkan (menghibahkan) buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul, Pengarang, Tahun dan Penerbit ditentukan dan atau disetujui oleh Kepala Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 25 Maret 2024



Kepala,

Indah Wijaya Antasari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 3144 /Un.19/D.Syariah /2/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : M. ISHLAHUL AZMAN
NIM : 1717304030
Smt./Prodi : XIII/PM/ Perbandingan Madzhab
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PRAKTIK POLITIK IDENTITAS TERHADAP MASYARAKAT SIPIL DI KECAMATAN BUMIAYU (Studi kasus Tokoh NU dan Muhammadiyah Bumiayu)" pada tanggal 26 Januari 2024 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **81 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Februari 2024

Ketua Sidang,

M. Fuad Zain, M.Sy

Sekretaris Sidang,

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

MISHLAHUL AZMAN

1717304030

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	78
2. Tartil	75
3. Tahfidz	75
4. Imla'	70
5. Praktek	76

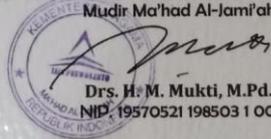
NO. SERI: MAJ-G1-2019-326

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : M. Ishlahul Azman
NIM : 1717304030
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA Kec. Baturren dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 92,7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Purwokerto, 12 April 2021



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Suprni, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT

Nomor: 888/K.LPPM/KKN.46/11/2020

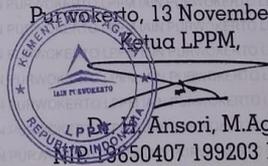
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : M ISHLAHUL AZMAN
NIM : 1717304030
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-435624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4312/III/2024

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / C
Microsoft Excel	75 / C
Microsoft Power Point	80 / C



Dibikan Kepada:

M ISHLAHUL AZMAN
NIM: 1717304030

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 16 November 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer
pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan
oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 18 Maret 2024
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الائمة كيهي الحاج سيد الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبورتو
الوحده لتنمية اللغة

CERTIFICATE

الشهادة
No.B-2971/Un.19/K.Bhs/PP.009/3/2024

This is to certify that
Name :
Place and Date of Birth
Has taken
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on:
with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 45
فهم المسوع

Structure and Written Expression: 43
فهم العبارات والتراكيب

Reading Comprehension: 47
فهم المقروء

Obtained Score : 450
المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الائمة كيهي الحاج سيد الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبورتو.



EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Intibarat al-Qur'an wal al-Lughah al-'Arabiyyah

Purwokerto, 18 Maret 2024
The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Muhammad S.S., M.Pd.
NIP.19720923 200003 2 001



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الائمة كيهي الحاج سيد الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبورتو
الوحده لتنمية اللغة

CERTIFICATE

الشهادة
No.B-4622/Un.19/K.Bhs/PP.009/2023

This is to certify that
Name :
Place and Date of Birth
Has taken
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on
with obtained result as follows

Listening Comprehension: 44
فهم المسوع

Structure and Written Expression: 42
فهم العبارات والتراكيب

Reading Comprehension: 49
فهم المقروء

Obtained Score : 450
المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الائمة كيهي الحاج سيد الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبورتو.



EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Intibarat al-Qur'an wal al-Lughah al-'Arabiyyah

Purwokerto, 11 April 2023
The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

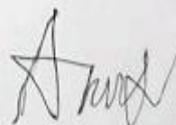
A. Identitas Diri

Nama : M. Ishlahul Azman
NIM : 1717304030
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 16 November 1998
No. HP : 083155814661
Alamat Rumah : Jl. Laren, Rt: 02/Rw: 04, Desa: Laren, Kecamatan:
Bumiayu, Kabupaten: Brebes
Nama Bapak : Kamiluddin
Nama Ibu : Siti Tabiah
Riwayat Pendidikan
SD/MI : MI Tarbiyatul Athfal Laren
SMP/MTS : SMP Negri 2 Bumiayu
SMA/MAN : MAN 3 Jombang
Kuliah : UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

B. Pengalaman Organisasi

Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah 2019

Purwokerto, 16 Maret 2024



M. Ishlahul Azman

NIM.1717304030